

RINGKASAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2019

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 disusun oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai wujud dari keinginan yang kuat dari pemimpin daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat atas performansi organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Performansi yang dilaporkan meliputi penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Penyusunan RLPPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bab IV, Pasal 23 yang menjelaskan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan RLPPD kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat dan mempublikasikan RLPPD kepada masyarakat melalui media cetak dan / atau media elektronik. Ringkasan LPPD menjadi bahan masukan bagi Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Oleh karena itu kami sampaikan ringkasan LPPD yang disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai berikut :

A. CAPAIAN KINERJA MAKRO

1. Indeks Pembangunan Manusia

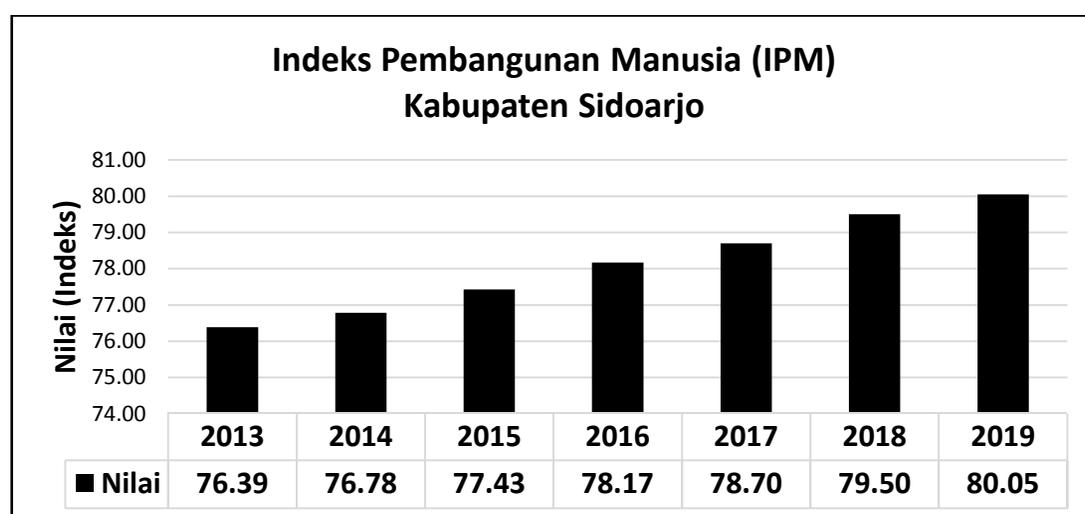
Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan indeks komposit sederhana yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

UNDP menggunakan IPM ini sejak tahun 1990. Sebagai alat ukur tunggal dan sederhana, IPM sangat cocok sebagai alat ukur kualitas hidup dan kinerja pembangunan, khususnya pembangunan manusia yang dilakukan di suatu wilayah pada waktu tertentu atau secara lebih spesifik IPM merupakan alat ukur kinerja dari pemerintahan suatu wilayah.

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup :

1. Umur Panjang dan Hidup Sehat (*a long and healthy life*)
Dimensi ini dicerminkan oleh Angka Harapan Hidup (*life expectancy at age*)
2. Pengetahuan (*knowledge*)
Dimensi ini dicerminkan oleh dua kriteria, yaitu :
 - a. Harapan Lama Sekolah (HLS)
 - b. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
3. Standar Hidup Layak (*decent standard of living*)
Dimensi ini dicerminkan oleh PDB per kapita. BPS merefleksikan dimensi ini melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Berikut perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sidoarjo :



Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

Besar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sidoarjo dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Angka IPM di kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikan dari 76.39 tahun 2013 menjadi 80,05 tahun 2109. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 79.51, maka capaian tahun 2019 mencapai 100,68% dari target, serta meningkat 0,69% dari capaian tahun 2018 yang mencapai angka 79,50%.

Komponen – komponen yang mempengaruhi perhitungan IPM di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

Indikator IPM Kabupaten Sidoarjo

INDIKATOR	SKOR
- Angka Harapan Hidup (tahun)	73,98
- Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,91
- Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	10,25
- Pengeluaran perkapita riil disesuaikan (Rp.000)	14.609

Sumber : BPS Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo menempati ranking 4 skor IPM se-Jawa Timur sekaligus mengungguli capaian IPM Provinsi Jawa Timur yang memiliki skor 71.50.

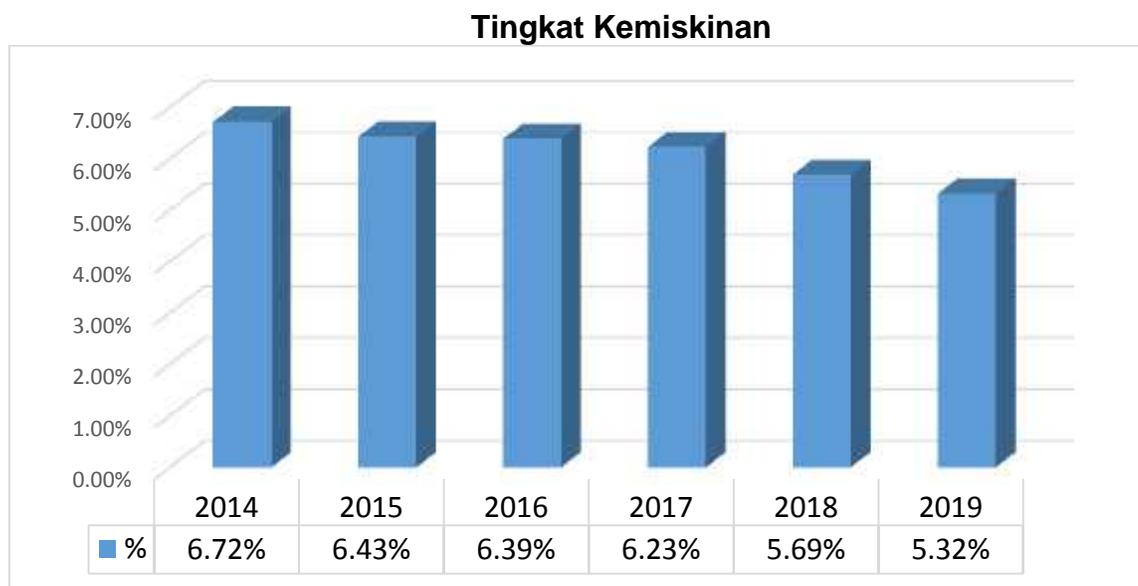
2. Angka Kemiskinan

Persentase kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan trend yang semakin menurun. Persentase angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2013 masih mencapai 6,72%, kemudian turun berturut-turut hingga menjadi 5,32% di tahun 2019. Selain memiliki trend menurun setiap tahunnya, persentase kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo juga masih di bawah persentase kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

Dari total penduduk Sidoarjo Tahun 2019 sebesar 2.266.533 jiwa, sebanyak 125,75 ribu jiwa atau 5,32 persen nya merupakan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (miskin/ sangat miskin).

Untuk perhitungan P1 (Indeks Kedalaman) sebesar 1.03 dan perhitungan P2 (Indeks Keparahan) sebesar 0.31 dengan Garis Kemiskinan sebesar 437.899 rupiah / kapit / bulan.

Perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Sidoarjo terlihat pada grafik sebagai berikut :



Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

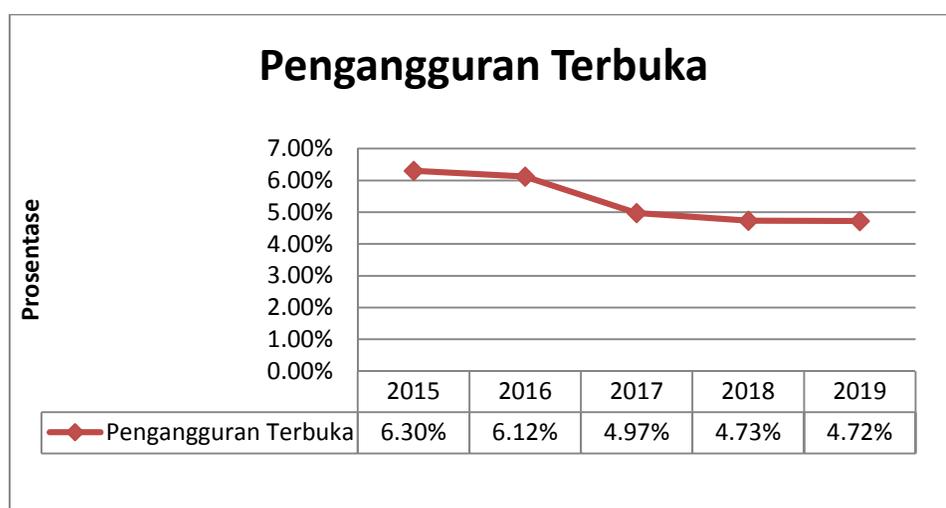
Apabila dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 6,36% maka telah tercapai hingga 112,57% dan menurun sebesar 0,71% dari tahun 2018.

Upaya untuk mengurangi angka kemiskinan yaitu dengan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga stabilitas makro ekonomi, stabilisasi harga, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim Investasi, menjaga regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor potensial daerah, dan mengembangkan infrastruktur di wilayah tertinggal.

3. Angka Pengangguran

Untuk mengukur tingkat ketersediaan kesempatan kerja oleh pemerintah kabupaten maka tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu ukurannya.

Berikut grafik perkembangan tingkat pengangguran tahun 2015 sampai dengan 2019.



Sumber Data : BPS dan Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan Kemnaker RI

Dari grafik di atas terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka menunjukkan penurunan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Dari 6,30 pada tahun 2015, mengalami penurunan menjadi 6,12% pada tahun 2016 dan penurunan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 4,97%. Pada tahun 2018 tingkat pengangguran terbuka kembali mengalami penurunan menjadi 4,73%. Pada tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 4,72%.

Hal ini disebabkan karena adanya Stabilitas perekonomian di Kabupaten Sidoarjo yang cukup mendukung dan komitmen pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mempermudah investasi.

Capain target tahun 2019 tersebut diatas sudah melebihi dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 5,56%.

Dalam upaya mengurangi pengangguran, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Tenaga Kerja berpedoman pada perencanaan tenaga kerja melalui Buku Rencana Tenaga Kerja 2017-2021 yang bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Upaya yang dilakukan untuk menekan angka pengangguran terbuka, antara lain :

1. Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja Menyelenggarakan Pelatihan Berbasis Kompetensi sehingga keluaran hasil pelatihan tersertifikasi dan mampu bersaing pada dunia kerja.
2. Menyelenggarakan Bursa Kerja, baik Bursa Kerja Terbuka maupun Bursa Kerja Khusus.

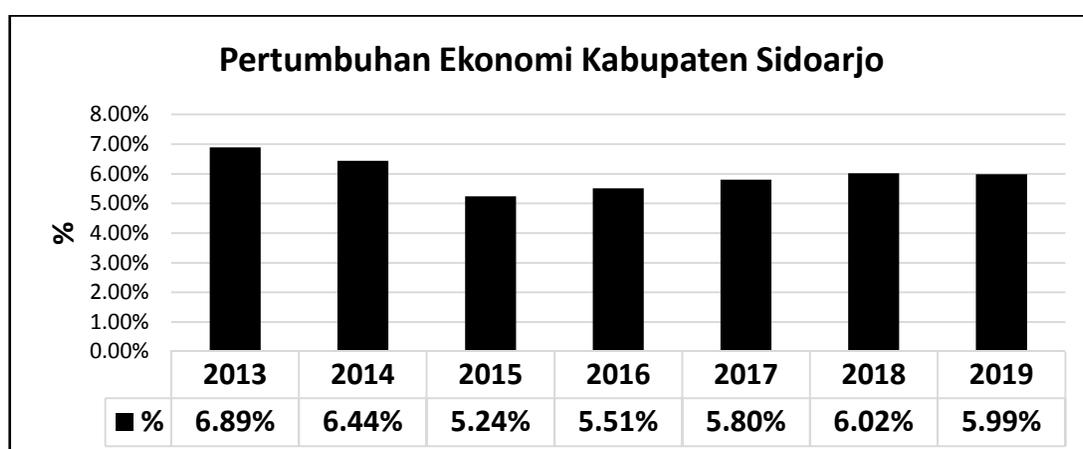
3. Menjalin hubungan industrial yang kondusif guna mengurangi angka perselisihan hubungan industrial yang berdampak pada PHK.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Pertumbuhan Ekonomi dapat diukur berdasarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) suatu daerah. Perkembangan PDRB di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan ADHK 2010 mengalami fase peningkatan, dimana dipengaruhi terutama oleh sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan.

Berikut perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sidoarjo :



Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Sidoarjo cenderung stabil, dan diharapkan dapat bertahan sampai dengan akhir masa jabatan tahun 2021, dengan akselerasi sektor potensial daerah, terutama pada sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, dan peningkatan usaha mikro melalui Program 1.000 WUB (Wira Usaha Baru). Untuk persentase pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 sampai dengan perhitungan sementara berada pada kisaran 5,99%, sehingga apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 5,67% maka capaian sementara di tahun 2019 sudah memenuhi target hingga 105,64%. walaupun terdapat penurunan dari tahun 2018 sebesar 0,5%.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur yang mencapai 5,45% dan pertumbuhan ekonomi Nasional

yang mencapai 5,07%, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo masih berada diatas rata – rata Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

5. Pendapatan Per Kapita

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di suatu daerah tidak bisa secara langsung diartikan meningkat pula kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Dampak pertumbuhan ekonomi tersebut harus bisa dipastikan dinikmati oleh seluruh masyarakat daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan relatif kurang berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat jika pertumbuhan jumlah penduduk juga tinggi. Salah satu indikator yang dianggap bisa lebih menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat daerah tersebut adalah PDRB perkapita/Pendapatan perkapita. Dengan definisi PDRB perkapita adalah total PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, dianggap bahwa tiap penduduk juga ikut merasakan peningkatan atau hasil pertumbuhan jika terjadi peningkatan PDRB perkapita di suatu daerah.

Dari data 5 tahun terakhir, terlihat bahwa peningkatan besaran PDRB masih selalu diikuti dengan kenaikan PDRB per kapita nya. Pada periode 5 tahun terakhir, PDRB Sidoarjo adalah 146,08 triliun rupiah (2015); 160,02 triliun rupiah (2016); 174,18 triliun rupiah (2017); 189,09 triliun rupiah (2018) dan 204,02 triliun rupiah (2019). Sedangkan PDRB perkapita nya mencapai 68.994 juta rupiah (2015); 74.411 juta rupiah (2016); 79.810 juta rupiah (2017); 85.385 juta rupiah (2018) dan 90.015 juta rupiah (2019) . Kenaikan besaran PDRB dan PDRB per kapita tiap tahun ini ternyata seiring dengan kenaikan Pendapatan Regional Perkapita.

Berikut tabel perbandingan PDRB dan PDRB Perkapita di Kabupaten Sidoarjo mulai dari tahun 2015 :

Perbandingan PDRB dan PDRB Perkapita (ADHB)

Tahun	PDRB ADHB (triliun rupiah)	PDRB Perkapita (juta rupiah)
2015	146.080.889,7	68.994
2016	160.020.653,4	74.411
2017	174.180.087,6	79.810
2018	189.093.191,5	85.385
2019	204.021.513,1	90.015

Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

Sedangkan grafik perkembangan PDRB perkapita mulai tahun 2015, adalah sebagai berikut :

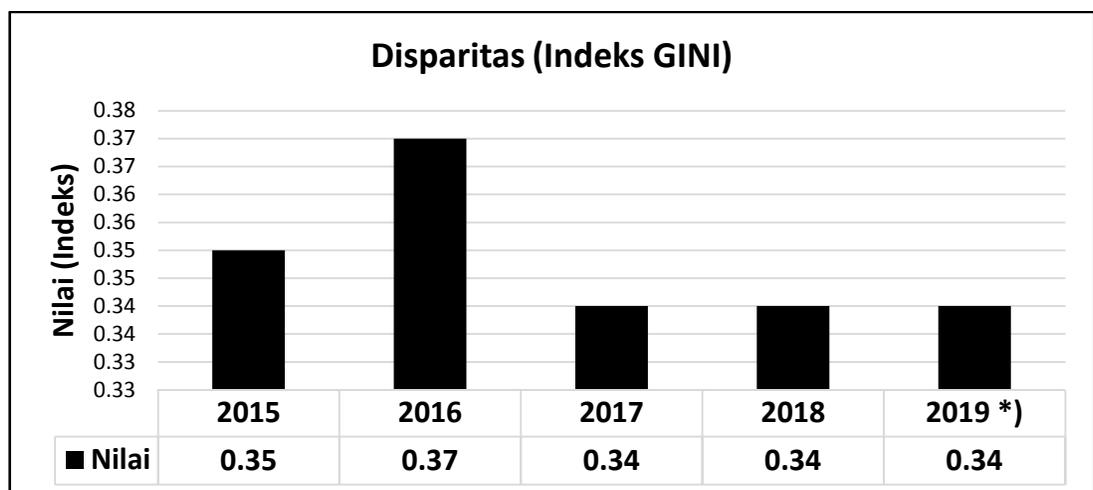


Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

6. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.

Berikut perkembangan Disparitas (Indeks GINI) di Kabupaten Sidoarjo :



Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

Gini rasio memiliki nilai antara 0 dan 1 (digunakan dalam bahasan ini), atau jika dalam persen maka nilainya antara 0 dan 100 persen. Berdasarkan nilai Gini rasio, terdapat 3 (tiga) kelompok ketimpangan, tinggi jika koefisien gini

bernilai 0,50 atau lebih, sedang jika nilainya diantara 0,36-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,36.

Perkembangan Indeks GINI di Kabupaten Sidoarjo masih berada dalam kisaran rendah, dimana telah dilakukan upaya pemerataan pembangunan infrastruktur untuk Sidoarjo wilayah barat dan wilayah timur, salah satunya adalah infrastruktur kesehatan yaitu Rumah Sakit di wilayah barat. Selain itu juga pembangunan infrastruktur irigasi dan jalan penghubung, sehingga usaha ekonomi masyarakat di semua wilayah di Kabupaten Sidoarjo dapat terhubung dengan baik, untuk mengurangi angka kesenjangan.

Untuk capaian tahun 2019 berdasarkan angka sementara mencapai kisaran 0,34 sehingga apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 0.37 maka capaian di tahun 2019 sudah memenuhi target. Upaya peningkatan infrastruktur di daerah tertinggal dan terluar sudah diupayakan untuk pemerataan pendapatan.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan Indeks GINI Provinsi Jawa Timur yang bernilai 0.39, maka capaian Indeks GINI Kabupaten Sidoarjo terbilang masih dalam proporsi yang lebih baik.

B. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

1. Urusan Pendidikan

a. Program

Program pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2019 meliputi :

1. Program Pendidikan Sekolah Dasar
2. Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
3. Program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan
6. Program Perluasan dan Aksesibilitas Pendidikan
7. Program Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Regional (BOSREG)

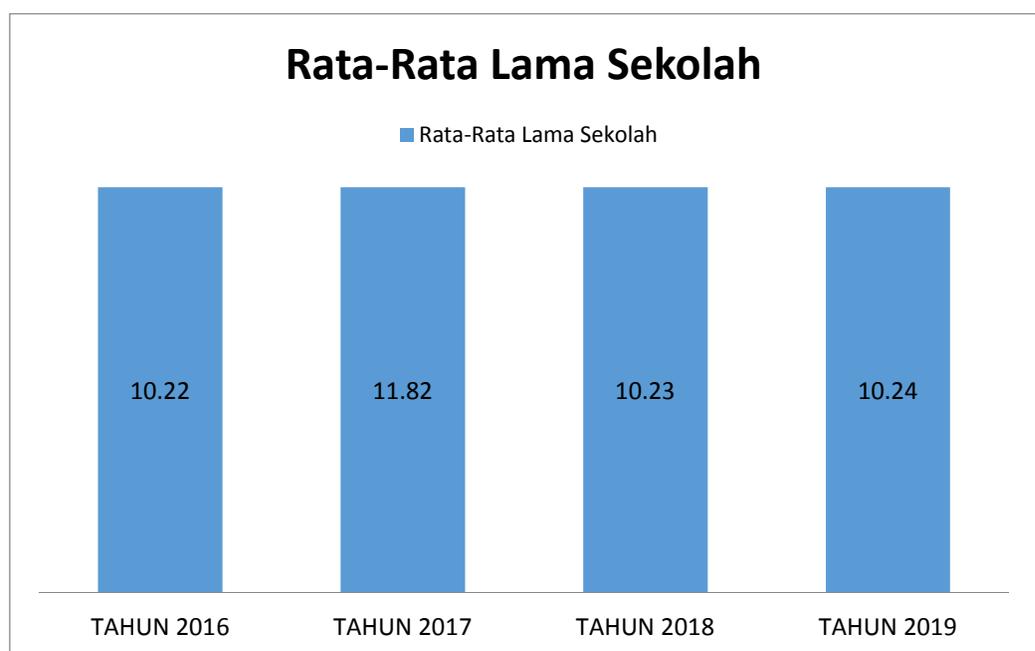
b. Realisasi Pelaksanaan Program Serta Permasalahan Dan Solusinya

Seluruh program urusan Pendidikan telah dilaksanakan, dan hasilnya dapat terlihat dari Meningkatnya Mutu dan Akses Pendidikan Dasar, diantaranya :

1. Rata – Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah merupakan kombinasi angka partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Sedangkan definisi Lama Sekolah adalah banyaknya tahun seorang menjalankan pendidikan formal hingga saat dilakukan survey, baik yang sedang dijalani saat ini (sedang bersekolah) atau pun pendidikan yang ditamatkan. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2021 target untuk rata-rata lama sekolah sampai dengan di tahun 2021 sebesar 14,55 tahun. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar 10,24 tahun dengan angka ketercapaian sebesar 94,81%. Dibandingkan pada tahun 2018 realisasi untuk rata-rata lama sekolah sebesar 10,23 tahun.

Dengan realisasi angka 10,24 tahun tersebut dapat diartikan bahwa masyarakat di Kabupaten Sidoarjo rata-rata sudah dapat menyelesaikan pendidikan pada tingkat Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun dan secara angka perhitungan ketercapaian rata-rata lama sekolah sudah mendekati Wajib Pendidikan Menengah 12 Tahun, pemenuhannya sebesar 1,76 tahun akan kita intervensi melalui program bersama dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur.



Sumber Data: Neraca Pendidikan Daerah (npd.data.kemdikbud.go.id)

2. Angka Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah dalam tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah juga dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2021 target untuk angka harapan lama sekolah sampai dengan di tahun 2021 sebesar 14,55 tahun. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar 14,75 tahun dengan angka ketercapaian sebesar 101,37%. Dibandingkan pada tahun 2018 realisasi untuk rata-rata lama sekolah sebesar 14,34 tahun. Hal tersebut bisa dikategorikan ada kenaikan sebesar 0,41 tahun.

Dengan realisasi angka 14,75 tahun tersebut dapat diartikan bahwa peserta didik lulusan SD sekarang di Kabupaten Sidoarjo punya potensi untuk bisa melanjutkan pada tingkat pendidikan Diploma II (DII).

Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2019 sebagai berikut :



Sumber Data: Neraca Pendidikan Daerah (npd.data.kemdikbud.go.id)

Upaya – yang telah dilakukan dalam mewujudkan peningkatan angka harapan lama sekolah, antara lain:

- a. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara umum dan secara khusus kepada pemangku kepentingan pendidikan termasuk kepada lembaga sekolah, madrasah dan lembaga-lembaga kursus yang menyelenggarakan pendidikan (pendidikan informal) untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan.

- b. Memberikan aksesibilitas yang seluas-luasnya tentang layanan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat tentang pembiayaan sekolah gratis setingkat Wajar Dikdas 9 (sembilan) tahun.

3. Rata-Rata Nilai Ujian Nasional (UN) SD/MI dan SMP/MTs

Pengukuran Rata-Rata Nilai Ujian Nasional merupakan hasil akhir penilaian peserta didik yang merupakan salah satu gambaran keberhasilan pendidikan yang dilakukan di setiap tingkatan pendidikan. Namun demikian nilai UN bukan merupakan ukuran yang mutlak keberhasilan pendidikan atau peningkatan kinerja pendidikan, melainkan masih banyak faktor yang mempengaruhi hasil penilaian ini.

Untuk setingkat SD/MI target yang ditetapkan untuk Nilai rata-rata UN tahun 2019 adalah sebesar 8,35 dengan realisasi sebesar 8,57 dengan angka ketercapaian 102,63%. Data tersebut diambil dari Laporan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah SD/MI Berstandar Nasional Tahun Ajaran 2018/2019 Provinsi Jawa Timur.

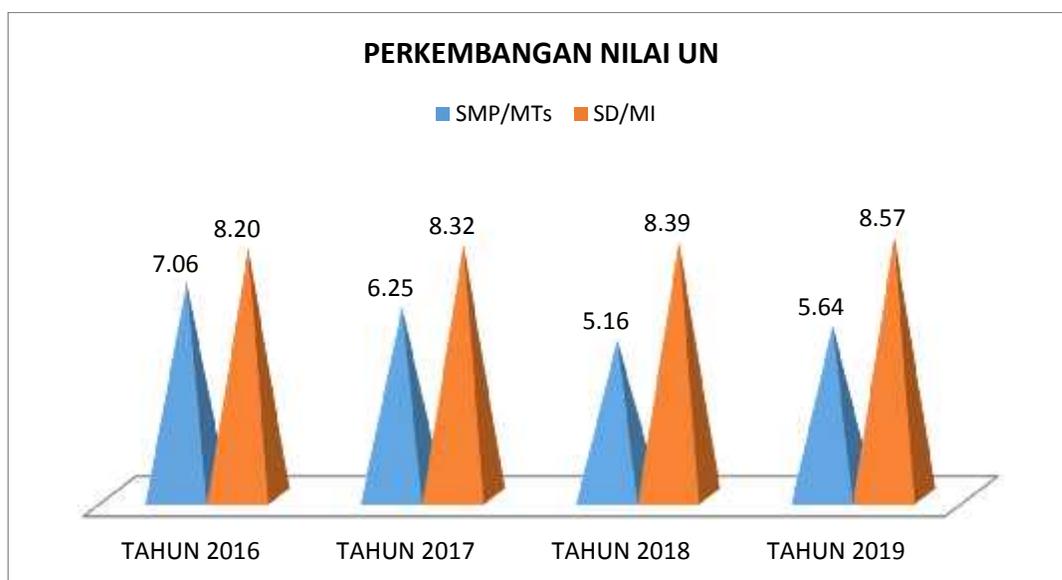
Dengan realisasi nilai 8,57 tersebut diartikan bahwa layanan mutu pendidikan lebih meningkat sesuai dengan tujuan pendidikan yang bermutu dan berkualitas.

Untuk setingkat SMP/MTs target yang ditetapkan untuk Nilai rata-rata UN tahun 2019 adalah sebesar 6,87 dengan realisasi sebesar 5,64 dengan angka ketercapaian 82,10%. Data tersebut diambil dari Laporan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah SMP/MTs Tahun Ajaran 2018/2019 Provinsi Jawa Timur.

Nilai capaian untuk Ujian Nasional SMP di Kabupaten Sidoarjo masih diatas rata-rata, baik Propinsi ataupun Nasional, yaitu rata-rata Propinsi 5;62 sedangkan untuk Nasional 5,28.

Nilai realisasi yang dicapai Kab. Sidoarjo untuk tingkat SMP sebesar 6,03, sedangkan lembaga Madrasah Tsanawiyah hanya sebesar 4,95 sehingga berpengaruh terhadap realisasi Nilai capaian Ujian Nasional dengan kategori SMP dan MTs. Salah satu indikator tidak tercapainya realisasi ini terletak pada lembaga Madrasah Tsanawiyah yang mengalami penurunan, sehingga berdampak pada hasil rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP/MTs. Yang pada intinya pengelolaan pengukuran mutu pendidikan Madrasah Tsanawiyah terdapat di wilayah Kementerian Agama, sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara normatif tidak mempunyai alat ukur untuk meningkatkan mutu.

Perkembangan nilai ujian nasional untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber Data : Laporan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah SD/MI dan SMP/MTs Tahun Ajaran 2018/2019 Provinsi Jawa Timur

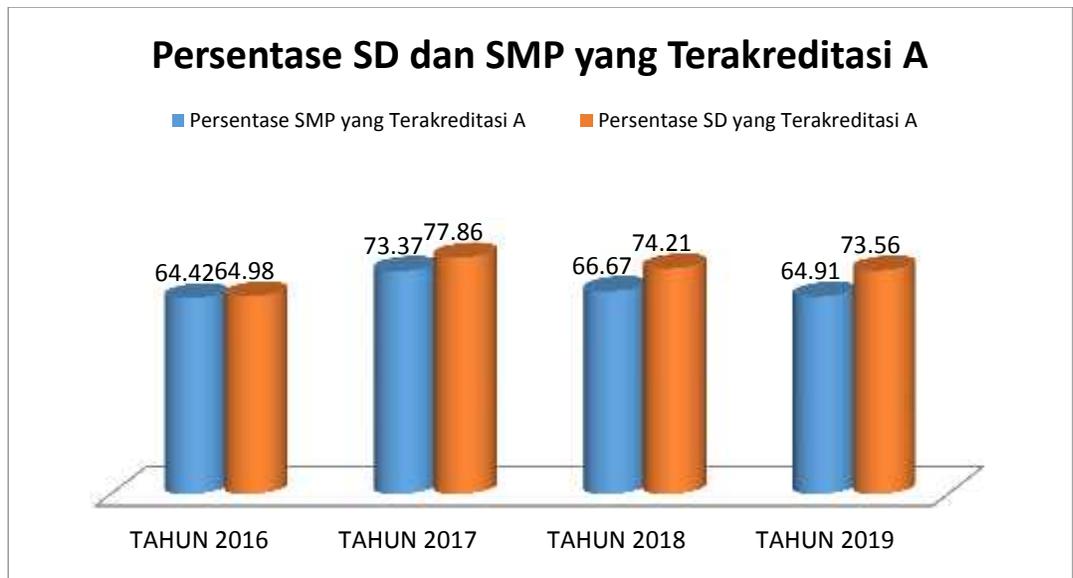
Upaya – upaya yang telah dilakukan dalam mewujudkan peningkatan nilai ujian nasional, antara lain :

- Peningkatan sarana prasarana UNBK berupa komputer PC
- Meningkatkan pembinaan berupa simulasi UNBK
- Meningkatkan secara bersama layanan mutu pendidikan dengan Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.

4. Persentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi

Di tahun 2019, target yang ditetapkan untuk Persentase SD yang terakreditasi A sebesar 72,11% terrealisasi sebesar 73,56%, dengan angka ketercapaian 102,01%. Untuk SMP target yang ditetapkan sebesar 70,09% terrealisasi sebesar 64,91% dengan angka ketercapaian 92,61%.

Perkembangan satuan pendidikan yang terakreditasi A pada masing-masing jenjang pendidikan pada tahun 2019 sebagai berikut :



Sumber Data: Neraca Pendidikan Daerah Tahun 2019

Upaya – upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan persentase SD dan SMP yang terakreditasi A yaitu: Peningkatan pemenuhan standar nasional pendidikan berupa :

1. Peningkatan sarana prasarana gedung sekolah/ruang kelas dan ruang penunjang lainnya.
2. Peningkatan standar proses/standar kelulusan berupa kegiatan-kegiatan penunjang evaluasi latihan Ujian Sekolah berupa Try Out.
3. Peningkatan standar pendidik dan tenaga kependidikan dengan memberikan tambahan kesejahteraan untuk Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap dan memberikan bantuan kesejahteraan kepada lembaga swasta untuk guru swasta.

5. Guru/pendidik yang telah bersertifikasi

Persentase Guru/Pendidik yang telah bersertifikasi adalah merupakan salah satu indikator kinerja sasaran untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing. Di tahun 2019 ini target yang ditetapkan sebesar 47,85% terrealisasi sebesar 55,85%, dengan angka ketercapaian 116,72%.

Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan guru/tenaga pendidik yang bersertifikasi profesi mengalami peningkatan yang berdampak pada layanan mutu pendidikan yang berkualitas.

Perkembangan Guru/Pendidik yang telah bersertifikasi pada tahun 2019 sebagai berikut :



Sumber Data: Neraca Pendidikan Daerah Tahun 2019

6. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar merupakan perbandingan antara jumlah seluruh peserta didik sekolah untuk jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah seluruh anak usia sekolah untuk jenjang pendidikan tersebut.

Target yang ditetapkan untuk APK tahun 2019, PAUD sebesar 92,67%, SD/MI sebesar 108,26% dan SMP/MTs sebesar 99,21%. Sedangkan realisasi APK yang dicapai pada tahun 2019 untuk PAUD sebesar 93,47%, SD/MI sebesar 108,98%, dan SMP/MTs sebesar 99,28%. Jika dibandingkan dengan Realisasi APK tahun 2018, maka terjadi kenaikan pada jenjang PAUD sebesar 0,67%, jenjang SD/MI mengalami kenaikan sebesar 1,01%, dan jenjang SMP/MTs mengalami kenaikan sebesar 0,27%.

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada masing-masing jenjang pendidikan pada tahun 2019 sebagai berikut :



Sumber Data: Dapodik dan Data Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2019

Upaya – upaya yang telah dilakukan dalam mewujudkan peningkatan APK, antara lain:

- 1) Pemberlakuan Pendidikan Gratis bagi Sekolah Negeri untuk biaya investasi dan operasional dan untuk Sekolah swasta meringankan beban orang tua
- 2) Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru secara online
- 3) Pemberian bantuan kepada sekolah swasta berupa hibah partisipatif untuk penambahan ruang kelas baru.

7. Angka Partisipasi Murni (APM)

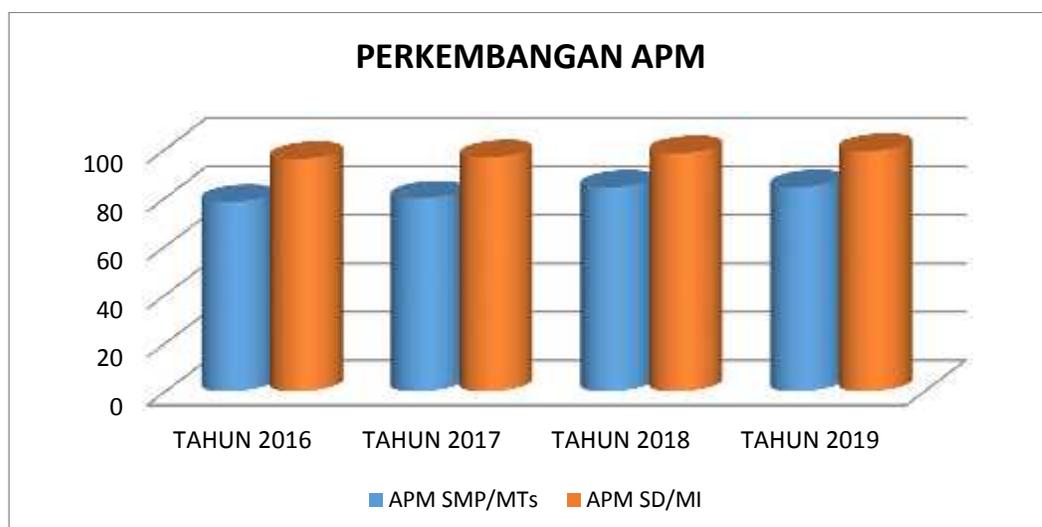
Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perbandingan antara jumlah anak usia 7 s.d 12 tahun; 13 s.d 15 tahun dan 16 s.d 18 tahun yang bersekolah di SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK dibagi seluruh jumlah anak usia 7 s.d 12 tahun; 13 s.d 15 tahun dan 16 s.d 18 tahun untuk jenjang pendidikan tersebut.

Target APM yang ditetapkan pada tahun 2019 untuk SD/MI sebesar 96,98% dan SMP/MTs sebesar 79,4%. Sedangkan realisasi APM yang dicapai pada tahun 2019 untuk SD/MI sebesar 99,21% dan SMP/MTs sebesar 84,15%.

Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) yaitu :

- 1) Sistem PPDB pada penerimaan tingkat satuan pendidikan baik madrasah ataupun sekolah pada usia normatif terutama pada siswa kelas 1 (satu) sekolah swasta
- 2) Keberadaan siswa di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Surabaya, Gresik, Mojokerto dan Pasuruan menentukan angka partisipatif
- 3) Masih banyak siswa melanjutkan di luar Kabupaten Sidoarjo pada Pondok Pesantren

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) pada masing-masing jenjang pendidikan pada tahun 2019 sebagai berikut :



Sumber Data: Dapodik dan Data Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2019

Upaya – upaya yang telah dilakukan dalam mewujudkan peningkatan APM, antara lain:

- 1) Kebijakan bersama tentang mekanisme penerimaan peserta didik baru antara Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana serta mutu sekolah wilayah perbatasan sebagai sekolah rujukan
- 3) Mendorong sekolah formal untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama pada program Diniyah setingkat SD dan SMP dan pemberlakuan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

c. SKPD Penyelenggara Urusan

Urusan pendidikan secara umum dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo berjumlah 6.255 orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan pendidikan menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

Sedangkan untuk jabatan fungsional yang tersedia sebagai berikut :

1. Guru Agama Islam
2. Guru Penjaskes

3. Guru Kelas
4. Guru Mata Pelajaran
5. Kepala Sekolah
6. Pengawas Dikmenum
7. Pengawas TK/SD
8. Penilik Dikmas
9. Pranata Komputer
10. Pranata Laboratorium Pendidikan
11. Fisioterapis
12. Psikologi Klinis

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran (per program)

Secara rinci anggaran dan realisasi masing masing program sebagaimana terlampir.

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 130,109,271,790.00	Rp 102,940,230,454.00	79.12%
2	Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan	Rp 1,944,963,300.00	Rp 1,505,947,200.00	77.43%
3	Program Perluasan dan Aksesibilitas Pendidikan	Rp 94,041,565,605.00	Rp 82,133,389,702.00	87.34%
4	Program Pendidikan Sekolah Dasar	Rp 14,982,953,652.00	Rp 13,213,324,727.00	88.19%
5	Program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Rp 3,022,806,362.00	Rp 2,572,808,505.50	85.11%
6	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp 15,396,892,545.00	Rp 13,486,184,200.00	87.59%
7	Program Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Regional (BOSREG)	Rp 154,549,039,998.00	Rp 140,256,901,362.90	90.75%

f. Proses Perencanaan

Proses perencanaan urusan pendidikan dilaksanakan secara partisipatif dengan diawali masukan permasalahan dan usulan program kegiatan dari sekolah maupun dari Komite Sekolah. Penyelenggaraan urusan pendidikan dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagaimana terlampir

2. Urusan Kesehatan

a. Program

Program pembangunan untuk urusan kesehatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 adalah :

- 1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- 2 Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
- 3 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- 4 Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
- 5 Program Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas
- 6 Program Peningkatan Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah

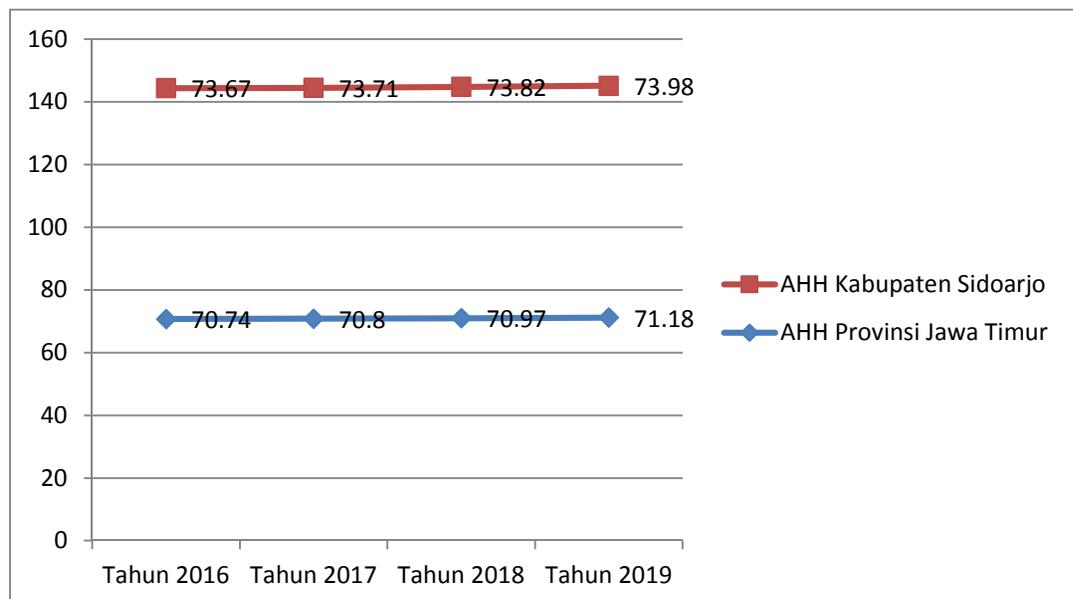
b. Realisasi Program serta Permasalahan dan Solusinya

Program tersebut telah dilaksanakan untuk mendukung capaian indikator sebagai berikut :

1. Angka Harapan Hidup

Tingginya Angka Harapan Hidup (AHH) mencerminkan tingkat kesehatan penduduk yang baik. Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), angka harapan hidup penduduk Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016 mencapai 73,67. Levelnya terus naik menjadi 73,71 di tahun 2017; 73,82 di tahun 2018; dan 73,98 di tahun 2019

Angka Harapan Hidup Kabupaten Sidoarjo dan Propinsi Jawa Timur Tahun 2016 - 2019



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Pada grafik diatas digambarkan bahwa dibanding dengan angka Propinsi Jawa Timur, Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kabupaten Sidoarjo lebih baik. Hal ini seiring dengan semakin baiknya kecukupan gizi dan budaya ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi seluruh masyarakatnya.

I. KELUARGA SEHAT

Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga merupakan program yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan RI untuk mewujudkan masyarakat Indonesia berperilaku sehat, hidup dalam lingkungan yang sehat, serta sadar akan pentingnya kesehatan.

Dikatakan keluarga Sehat jika telah memenuhi Indeks Keluarga Sehat (IKS) 0,80 dari jumlah keluarga yang ada, dengan indikator :

1. Keluarga mengikuti program KB (keluarga berencana)
2. Ibu hamil memeriksakan kehamilannya (*Ante Natal Care/ ANC*) sesuai standar
3. Bayi mendapatkan Imunisasi lengkap
4. Pemberian ASI eksklusif bayi 0 sd 6 bulan
5. Pemantuan pertumbuhan balita
6. Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar
7. Penderita hipertensi yang berobat teratur
8. Penderita gangguan jiwa berat yang diobati
9. Tidak ada anggota keluarga yang merokok
10. Sekeluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
11. Mempunyai sarana air bersih
12. Menggunakan jamban keluarga

Sampai dengan tahun 2019, capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) secara nasional sebesar 0,14. Angka ini masih jauh dari target yang ditetapkan (0,80). Sedangkan capaian IKS Propinsi Jawa Timur sebesar 0,16. Kabupaten Sidoarjo sendiri, meskipun sama-sama belum mencapai target, namun capaian IKS jauh lebih baik dari capaian nasional dan propinsi, yaitu sebesar 0,22.

Selengkapnya untuk melihat capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) dari tahun 2016 sampai tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Persentase Keluarga Sehat Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 – 2019

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
	TARGET	REAL	TARGET	REAL	TARGET	REAL
Persentase Keluarga Sehat	-	0,06	0,16	0,17	0,21	0,22

Sumber : Seksi Yanmer Dinkes Kab. Sidoarjo

Pada dasarnya tidak dijumpai pemasalah yang signifikan atas capaian target yang telah ditetapkan, namun demikian permasalahan yang ada dan tidak cukup signifikan, antara lain :

1. Aplikasi PIS PK, yang merupakan alat bantu dalam salah satu pencapaian keluarga sehat, sering *trouble*, sehingga proses entri data terhambat.
2. Terdapat perbedaan Definisi Operasional (DO) dari indikator PIS PK, menyebabkan terjadinya salah persepsi dalam hal entri data dalam aplikasi PIS PK, yang mempengaruhi hasil capaian indeks.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian indeks keluarga sehat adalah sebagai berikut :

1. Pemberdayaan seluruh tenaga puskesmas agar melakukan pendataan sekaligus intervensi kepada keluarga yang dikunjunginya.
2. Berkoordinasi dengan tenaga kesehatan yang menjadi jejaring puskesmas untuk ikut melakukan pendataan dan intervensi kepada masyarakat.
3. Melakukan intervensi kepada keluarga sehingga keluarga pra sehat dapat meningkat menjadi keluarga sehat.

II. RATA - RATA NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PUSKESMAS

Seiring kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan.

Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) puskesmas di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 adalah 80. Dibanding dengan tahun 2018 (82,45), IKM Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 semakin meningkat. Rata-rata IKM puskesmas di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2019 adalah 83,68. Namun. Puskesmas terus berbenah dalam peningkatan kualitas pelayanan yang berimbas pada semakin tingginya indeks kepuasan masyarakat dengan cara sebagai berikut:

- 1) Menstandarkan pelayanan kesehatan dengan terakreditasinya Puskesmas yang merupakan pengakuan dari lembaga independent tentang kualitas pelayanan di Puskesmas;
- 2) Berinovasi dalam memberikan pelayanan salah satunya dengan Sistem Antrian Pelayanan melalui SIAP TARIK (Puskesmas Tarik), CAK RAHMAN (Puskesmas Krembung), SI ELOK RUPA (Puskesmas Waru), pelayanan rekam medis paperless terintegrasi mulai antrian sampai mendapatkan obat;

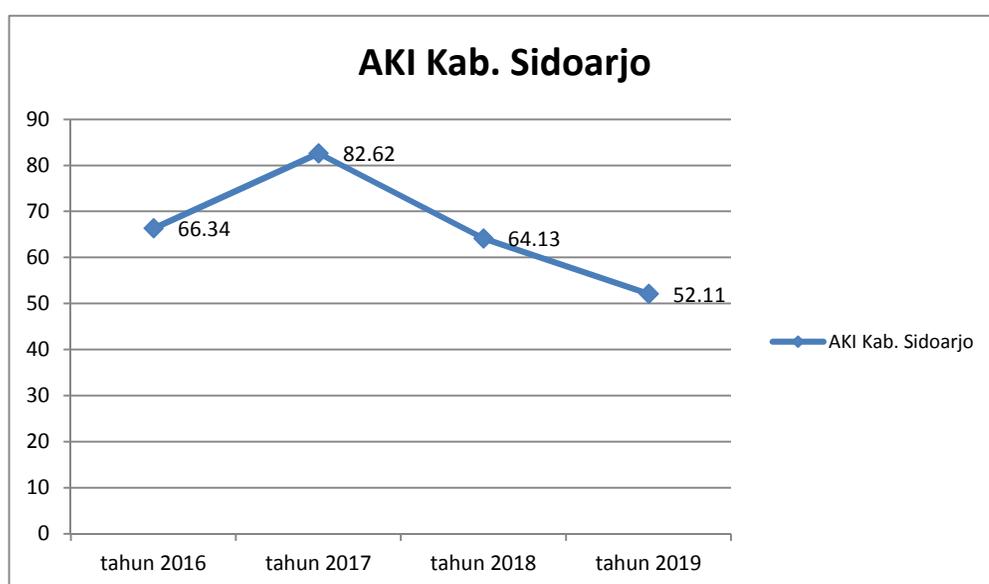
- 3) Rekrutmen tenaga pelayanan Non PNS untuk memenuhi rasio jumlah tenaga pelayanan sesuai standar;
- 4) Menggalakkan upaya promotif dan preventif serta mensinergikan dengan upaya kuratif rehabilitatif (home visit, puskesmas dan PIS-PK);
- 5) Relokasi Puskesmas Gedangan ke area yang memenuhi standard;
- 6) Penambahan Puskesmas Induk baru di wilayah padat penduduk pada tahun 2019, yaitu di wilayah kerja Puskesmas Candi dan Gedangan.

1.1 Angka Kematian Ibu

Kematian Ibu adalah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan dan masa nifas, kecuali kasus kecelakaan. Angka Kematian Ibu (AKI) di kabupaten Sidoarjo dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan, tahun 2019 AKI Kabupaten Sidoarjo sebesar 52,11 per 100.000 kelahiran hidup atau 19 jiwa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, lebih rendah dibanding tahun 2018 (64,13 per 100.000 kelahiran hidup), tahun 2017 (82,62 per 100.000 kelahiran hidup), dan tahun 2016 (66,34 per 100.000 kelahiran hidup). Jika dibanding target yang dipasang di tahun 2019 yaitu 71,4 per 100.000 kelahiran hidup, dibanding target Provinsi Jawa Timur (90,92 per 100.000 kelahiran hidup) dan target nasional (305 per 100.000 kelahiran hidup), angka kematian ibu Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 cenderung baik. Ini dapat diartikan bahwa Kabupaten Sidoarjo cukup berhasil dalam penanganan AKI, melalui program-program yang telah dilaksanakan dalam upaya penurunan AKI berhasil guna.

Perkembangan angka kematian ibu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 di Kabupaten Sidoarjo terlihat pada grafik berikut ini :

Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2016 – 2019

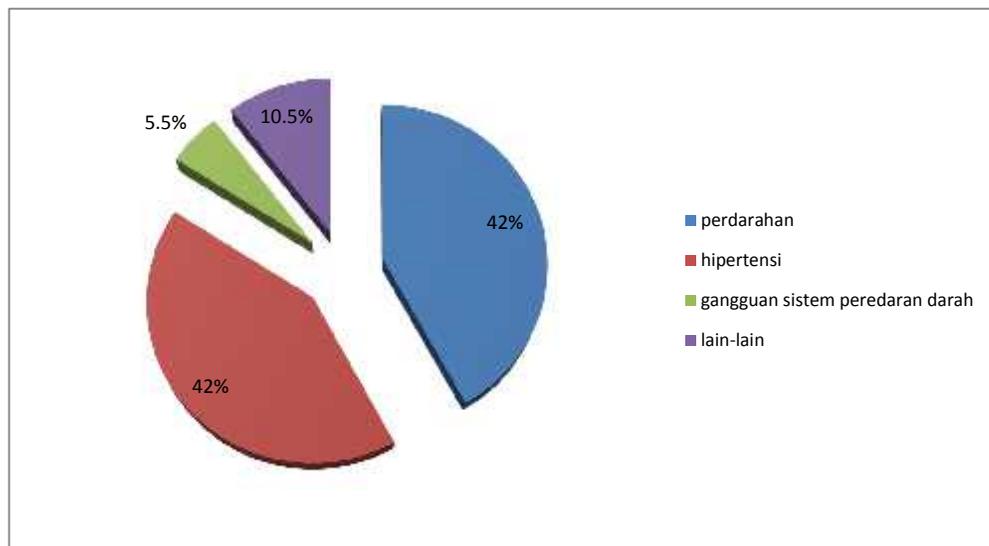


Sumber : Seksi Kesga Dinkes Kab. Sidoarjo

Adapun penyebab kematian ibu mayoritas disebabkan karena perdarahan 42% dan hipertensi 42%, gangguan sistem peredaran darah 5,5% dan lain-lain sebesar 10,5%

Lebih rinci penyebab kematian ibu digambarkan sebagai berikut :

Penyebab Kematian Ibu Tahun 2019



Sumber : Seksi Kesga Dinkes Kab. Sidoarjo

Masa kematian ibu mayoritas pada usia produktif (20 – 34 tahun) sebesar 63,2%, diatas 35 tahun 36,8%, terutama terjadi pada masa nifas.

Upaya – upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu yaitu :

- Pelaksanaan penerapan pelayanan standar ibu hamil (*Ante Natal Care/ ANC terpadu-10T*);
- Peningkatan keterampilan tenaga kesehatan dalam APN (*Peer Review Asuhan Persalinan Normal*), kelas ibu, kegawatdaruratan;
- Pemanfaatan buku KIA bagi semua ibu dan tenaga kesehatan untuk memperoleh informasi dan memantau kesehatan ibu hamil;
- Refreshing deteksi risiko tinggi oleh masyarakat (kader kesehatan, PKK, dll)
- Optimalisasi dan Pemberdayaan Desa dengan P4K (Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) termasuk penempelan stiker P4K dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat ini dibentuk dalam Pokja 1 (Pendataan, Penandaan, Pendampingan), Pokja 2 (Tabulin & Dasolin). Pokja 3 (Donor Darah), Pokja 4 (Ambulan Desa);
- Melakukan penilaian tatalaksana pada gawat darurat maternal dan neonatal melalui *skill assesment* dengan sasaran tenaga kesehatan (bidan);

- Optimalisasi sistem rujukan : kolaborasi SI CANTIK dengan SIMANIS RSUD, untuk kasus *emergency*/ rujukan darurat persalinan;
- Melakukan pengkajian dan pembelajaran *Audit Maternal Perinatal* (AMP) pada kasus *near miss* dan atau kematian ibu hamil, bersalin, ibu nifas dan pada perinatal dan neonatal.
- Optimalisasi jalinan kerjasama dan koordinasi di wilayah
- Evaluasi dan optimalisasi Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (Penakib) Kabupaten Sidoarjo;
- Aplikasi Software Si Cantik (Sidoarjo Cegah Angka Kematian Ibu dan Anak), program bayi sampai dengan anak.

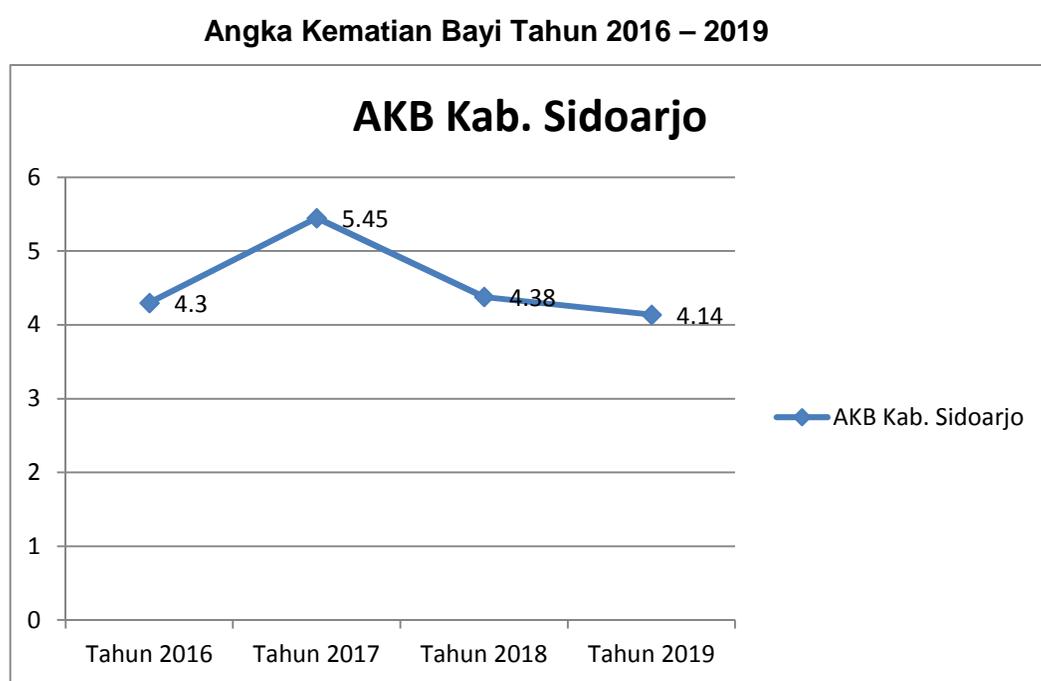
1.2 Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan keberhasilan pelayanan kesehatan suatu wilayah. Di Kabupaten Sidoarjo, target Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2019 adalah 6,5 per 1.000 kelahiran hidup, sedang realisasi capaian sebesar 4,14 per 1.000 kelahiran hidup. Jika dibanding dengan realisasi tahun 2018 (4,38 per 1.000 kelahiran hidup), 2017 (5,45 per 1.000 kelahiran hidup) dan 2016 (4,3 per 1.000 kelahiran hidup) dan dibanding dengan target tahun 2019, maka capaian Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 ini cukup baik. Ini berarti bahwa program dalam upaya penurunan angka kematian bayi di Kabupaten Sidoarjo dikatakan berhasil. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa upaya dalam penurunan angka kematian bayi, antara lain:

- Peningkatan ketrampilan petugas tentang manajemen Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), asfiksia, dan penanganan kegawat daruratan bayi;
- Adanya rujukan dini berencana, maksudnya dari persalinan yang bermasalah (mulai ibu hamil beresiko, ibu bersalin beresiko dan neonatus beresiko) dilakukan monitoring evaluasi untuk kemudian dirujuk ke RS;
- Melaksanakan *skill assesment* pada gawat darurat neonatal dengan sasaran tenaga kesehatan;
- Melakukan *Audit Maternal Perinatal* (AMP) pada kasus *near miss* dan atau kematian neonatal;
- Pemberian pelayanan *Ante Natal Care* (ANC) terpadu (10 T);
- Pengembangan aplikasi software si CANTIK (Sidoarjo Cegah Kematian Ibu dan Anak) untuk pemantauan kesehatan anak (mulai dari lahir sampai dengan balita), dipantau tumbuh kembangnya untuk mengantisipasi terjadinya stunting.

Dibanding dengan target di tingkat Provinsi Jawa Timur (22 per 1.000 kelahiran hidup) dan tingkat nasional (24 per 1.000 Kelahiran Hidup), maka Kabupaten Sidoarjo dikatakan berhasil dalam program penurunan Angka Kematian Bayi (AKB).

Perkembangan Angka Kematian Bayi tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terlihat pada grafik berikut ini :



Sumber : Seksi Kesga Dinkes Kab. Sidoarjo

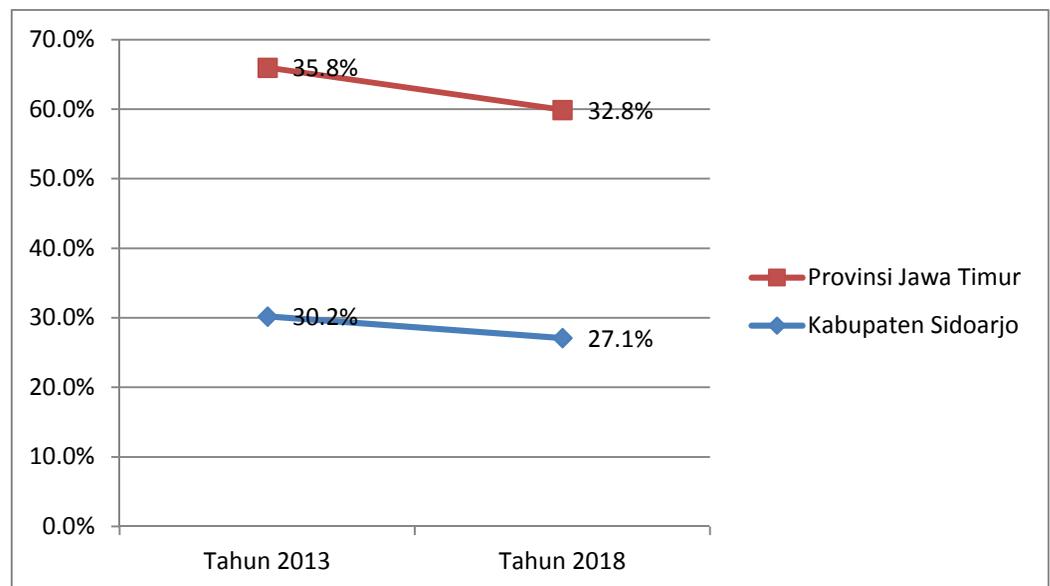
1.3 Persentase Balita Stunting

Balita stunting adalah balita yang panjang badannya/ tinggi badannya tidak sesuai dengan usia (Panjang badan menurut umur atau tinggi badan menurut umur < -2 SD

Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Stunting bisa terjadi mulai dari dalam kandungan, bayi baru lahir (dengan panjang badan < 48 cm) sampai dengan anak usia 2 tahun.

Stunting merupakan salah satu program nasional. Kondisi balita stunting di Kabupaten Sidoarjo menurut angka Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) tahun 2013 sebesar 30,2%, sedangkan tahun 2018 sebesar 27,1%. Angka ini dikatakan cukup baik jika dibanding dengan capaian stunting Provinsi Jawa Timur sebesar 35,8% (tahun 2013) dan sebesar 32,81% (tahun 2018).

Presentase Stunting Kabupaten Sidoarjo dibanding Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dan 2018



Sumber : Seksi Kesga Dinkes Kab. Sidoarjo berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)

Dari grafik tersebut, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Sidoarjo berhasil dalam penanganan masalah gizi. Keberhasilan ini adalah bentuk komitmen kuat Pemerintah Daerah Sidoarjo untuk menanggulangi masalah gizi (stunting dan gizi buruk) yang dituangkan dalam Perda No 1 Tahun 2016 tentang Perbaikan Gizi dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

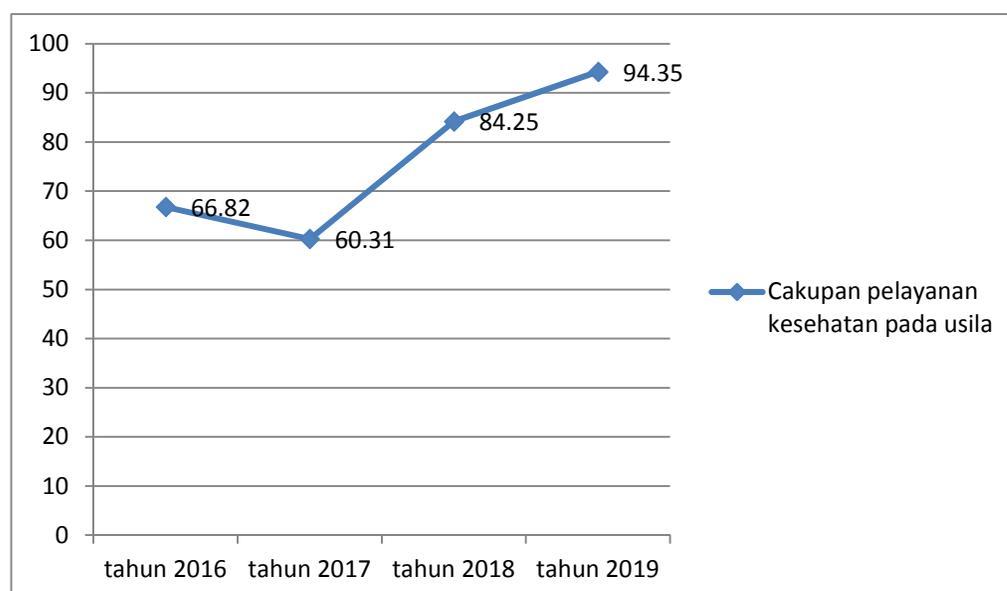
1.4 Persentase Usia Lanjut Yang Sehat

Masalah kesehatan yang sering dialami lanjut usia adalah malnutrisi, gangguan keseimbangan, kebingungan mendadak, dll. Selain itu, beberapa penyakit yang sering terjadi pada lanjut usia antara lain hipertensi, gangguan pendengaran dan penglihatan, demensia, osteoporosis, dsb.

Cakupan pelayanan kesehatan untuk usia lanjut (>60 tahun) di Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 sebesar 94,4% (167.560 dari 177.586 orang dengan usia 60 tahun ke atas), dengan persentase usia lanjut yang sehat sebesar 88,7% (153.271 dari 177.586 orang dengan usia 60 tahun ke atas). Sedangkan tahun 2018, cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut di Kabupaten Sidoarjo sebesar 84,25%, dengan persentase usia lanjut yang sehat sebesar 74,82%, tahun 2017 sebesar 60,31% dan tahun 2016 sebesar 66,82%. Jika melihat tren dari tahun ke tahun, maka capaian pelayanan kesehatan pada usia lanjut di Kabupaten Sidoarjo semakin menunjukkan angka yang baik. Ini menunjukkan bahwa program-program kesehatan terhadap masyarakat usia lanjut cukup menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Capaian pelayanan kesehatan pada usia lanjut di

Kabupaten Sidoarjo mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 selengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

**Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Tahun 2016 – 2019**



Sumber : Seksi Kesga Dinkes Kab. Sidoarjo

1.5 Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri

Desa Siaga Aktif adalah bentuk pengembangan Desa Siaga yang : 1) Penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari melalui Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau sarana kesehatan yang ada di wilayah tersebut seperti, Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau sarana kesehatan lainnya. 2) Penduduknya mengembangkan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) dan melaksanakan Surveilans berbasis masyarakat (melalui pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan dan perilaku), kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana, serta penyehatan lingkungan sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif, ada 8 (delapan) indikator desa kelurahan siaga aktif. Dan dalam pengembangannya, ada 4 (empat) kategori pentahapan desa siaga aktif.

Pentahapan Desa Siaga Aktif, yaitu :

1. Desa Siaga Aktif Pratama
2. Desa Siaga Aktif Madya
3. Desa Siaga Aktif Purnama
4. Desa Siaga Aktif Mandiri

Terdapat 8 (delapan) Indikator Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri adalah sebagai berikut :

No	Desa Siaga Aktif Purnama	No	Desa Siaga Aktif Mandiri
1.	Sudah memiliki Forum Masyarakat Desa dan Kelurahan yang berjalan rutin setiap bulan	1.	Sudah memiliki Forum Masyarakat Desa dan Kelurahan yang berjalan rutin setiap bulan
2.	Sudah memiliki Kader Pemberdayaan Masyarakat/Kader Kesehatan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif antara 6-8 orang	2.	Sudah memiliki Kader Pemberdayaan Masyarakat/Kader Kesehatan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif lebih dari 9 orang orang
3.	Sudah ada kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari.	3.	Sudah ada kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari.
4.	Sudah memiliki Posyandu dan 3 (tiga) UKBM lainnya aktif	4.	Sudah memiliki Posyandu dan lebih dari 4 (empat) UKBM lainnya yang aktif dan berjenjang
5.	Sudah mengakomodasi dana untuk Pengembangan Desa Kelurahan Siaga Aktif dalam anggaran pembangunan Desa atau kelurahan serta mendapat dukungan Dana dari masyarakat dan Dunia Usaha.	5.	Sudah mengakomodasi dana untuk Pengembangan Desa Kelurahan Siaga Aktif dalam anggaran pembangunan Desa atau kelurahan serta mendapat dukungan Dana dari masyarakat dan Dunia Usaha.
6.	Sudah ada peran aktif masyarakat dan pe aktif dunia usaha dan ormas dalam kegiatan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif	6.	Sudah ada peran aktif masyarakat dan peran aktif dunia usaha dan ormas dalam kegiatan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif
7.	Sudah memiliki peraturan formal(tertulis) di Tingkat Desa atau Kelurahan yang melandasi dan mengatur pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.	7.	Sudah memiliki peraturan formal(tertulis) di Tingkat Desa atau Kelurahan yang melandasi dan mengatur pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
8.	Minimal 40% Rumah Tangga di Desa dan Kelurahan Siaga Aktif mendapat pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	8.	Minimal 70% Rumah Tangga di Desa dan Kelurahan Siaga Aktif mendapat pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Dari 353 desa/ kelurahan di Kabupaten Sidoarjo, ada 6 (enam) desa/ kelurahan yang terdampak lumpur lapindo, sehingga keberadaan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2019 tercatat 347 desa/ kelurahan. Untuk tahun 2019, target desa siaga aktif purnama mandiri sebesar 41% (142 desa/ kelurahan). Namun, Kabupaten Sidoarjo berhasil mencapai tahapan desa/ kelurahan pada kategori siaga aktif PURI (Purnama Mandiri) sejumlah 173 desa/kel (121% desa/ kelurahan). Sedangkan desa/ kelurahan berada pada pentahapan Pratama 26 desa/kel (7,49%) serta untuk pentahapan Madya ada 148 desa/ kel (42,65%).

Gambaran ringkas klasifikasi Desa Siaga Aktif sebagai berikut:

NO	KLASIFIKASI DESA/KEL	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Siaga Aktif Purnama Mandiri	142	173	121%
2	Siaga Aktif Pratama	0	26	7,49%
3	Siaga Aktif Madya	0	148	42,65%
4	Desa terdampak lumpur lapindo		6	
	Jumlah Desa		353	

1.1 Persentase Desa/ Kelurahan UCI

Desa yang mencapai UCI (*Universal Child Immunization*) adalah desa dimana 88% bagi di wilayah desa tersebut telah diimunisasi lengkap. Sedangkan target desa/ kelurahan UCI tahun 2019 sebanyak 89%. Pada tahun 2019, dari 353 desa/ kelurahan yang ada, terdapat 344 (97,45%) desa/ kelurahan yang telah mencapai UCI. Jika dibanding dengan target, maka di tahun 2019, semua desa/ kelurahan di Kabupaten Sidoarjo sudah mencapai UCI.

Meskipun UCI di Kabupaten Sidoarjo sudah melebihi target, namun tetap diwaspadai terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit PD3I (Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi) terutama di puskesmas yang UCI desanya belum mencapai target.

Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas program imunisasi adalah dengan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan, antara lain DQS (*Distric Quality Self Assesment*), survei *Effectif Vaksin Management* (EVM), dan *Rapid Convenience Assesment* (RCA) sweeping sasaran, Supervisi Supportif, peningkatan kapasitas (*knowledge skill*) petugas dan pemantauan kualitas penyimpanan vaksin, serta pemenuhan logistik pelayanan imunisasi, baik di layanan pemerintah maupun swasta.

1.2 Persentase Penduduk 15 Tahun dengan Hipertensi

Pengertian hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan gangguan pada sistem peredaran darah yang dapat menyebabkan kenaikan tekanan darah di atas nilai normal, yaitu melebihi 140 / 90 mmHg.

Pengukuran dilakukan pada penduduk yang berusia lebih dari atau sama dengan 15 tahun. Definisi ini didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019. Dengan jumlah sasaran dihitung berdasarkan prevalensi 32,1% dari jumlah penduduk berusia lebih dari atau sama dengan 15 tahun. Angka prevalensi ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2018.

Pengukuran dapat dilakukan di dalam unit pelayanan kesehatan primer, pemerintahan swasta, di dalam maupun diluar gedung. Di kabupaten Sidoarjo, estimasi penderita hipertensi usia 15 tahun 2019 sejumlah 552.490 (25% dari jumlah penduduk), dengan proporsi laki-laki sebesar 275.778 penduduk (12,26%) dan perempuan sebesar 276.712 penduduk (12,30%). Dari estimasi yang menderita hipertensi, sebanyak 322.004 orang (58,3%) mendapatkan pelayanan kesehatan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Estimasi Persentase Penduduk 15 tahun dengan Hipertensi di
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019**

Jumlah penduduk	Jumlah estimasi penderita hipertensi berusia 15 tahun				Mendapatkan pelayanan kesehatan			
	Laki-laki	Perempuan	Total	%	Laki-laki	Perempuan	Total	%
2.249.476	275.778	276.712	552.490	25	126.287	195.717	322.004	58,3

Sumber : Seksi Penyakit Tidak Menular

Kendala dan permasalahan dalam pencapaian yang dihadapi antara lain :

- Pelaksanaan skrining belum melibatkan semua unsur di puskesmas, karena keterbatasan SDM;
- Kegiatan Posbindu (pelaksanaan skrining) belum semuanya *mobile*;
- Angka prevalensi hasil riskedas terbaru mengalami kenaikan, sehingga mempengaruhi jumlah sasaran dan capaian program;

Namun demikian, tetap dilakukan upaya dalam menghadapi permasalahan yang terjadi, diantaranya:

- Pelaksanaan skrining harus melibatkan semua unsur di puskesmas
- Kegiatan Posbindu harus *mobile* (berpindah) dan jemput bola dengan melibatkan lintas sektor dan lintas program.
- Pencatatan dan pelaporan hipertensi harus melibatkan semua pengelola program di puskesmas dan institusi kesehatan lain di luar puskesmas.

1.3 Persentase Orang Terinfeksi HIV Positif Mendapatkan ARV

Estimasi penemuan kasus HIV-AIDS sampai dengan tahun 2020 di Kabupaten Sidoarjo adalah 5.226 kasus. Adapun penemuan kasus kumulatif HIV sampai dengan tahun 2019 adalah 3.440 dan untuk AIDS sebanyak 1.222 kasus.

Dari sekian orang terinfeksi HIV positif sampai dengan tahun 2019 yang ditemukan, 75% mendapatkan ARV (*Antiretroviral Virus*). Angka ini masih belum mencapai target (90%). Hal ini disebabkan karena:

- Terbatasnya layanan Perawatan Dukungan dan Pengobatan (PDP) HIV yang ada;
- Minimnya pendampingan ODHA (Orang Dengan HIV-AIDS) oleh tenaga kesehatan, baik yang sudah ARV maupun yang belum;
- ODHA yang ditemukan berasal dari luar wilayah Kabupaten Sidoarjo;
- Terbatasnya petugas yang terlatih terhadap konseling kepatuhan minum obat.

Pengendalian HIV/ AIDS merupakan salah satu isu strategis yang tertuang dalam rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo 2016–2021.

Upaya pencegahan dan penanggulangan dilakukan melalui penyuluhan masyarakat, penjangkauan dan pendampingan kelompok resiko tinggi dan intervensi perubahan perilaku, layanan konseling dan testing HIV, layanan *Harm Reduction*, pengobatan dan pemeriksaan berkala penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS), pengamanan darah donor dan kegiatan lain yang menunjang pemberantasan HIV/AIDS. Serta penambahan Klinik Inisiasi Anti Retroviral Virus (ARV) yang saat ini menjadi 10 klinik, diantaranya puskesmas Krian, Porong, Waru, Prambon, Krembung, Sukodono, Gedangan, Sedati, Taman dan RSUD Sidoarjo.

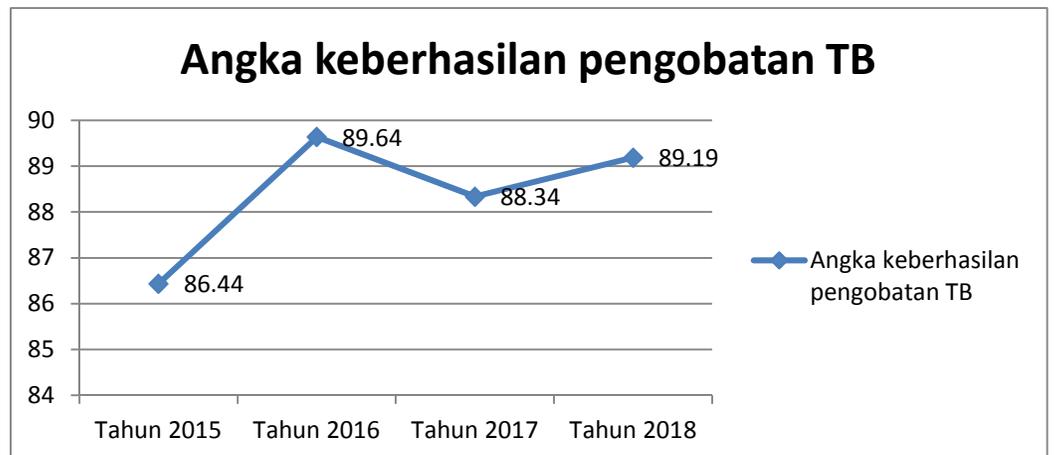
1.4 Angka keberhasilan pengobatan TB

[Tuberkulosis](#) alias TB atau TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Bakteri ini sebagian besar (95%) menyerang paru-paru sehingga disebut TB Paru. TB Paru masih menjadi momok penyakit yang menakutkan bagi masyarakat dunia, terutama di Indonesia.

Angka keberhasilan pengobatan TB Paru (*Treatment Success Rate =TSR*) adalah angka yang menunjukkan prosentase pasien baru TB Paru terkonfirmasi bakteriologis yang menyelesaikan pengobatan (baik yang sembuh maupun pengobatan lengkap) diantara pasien baru TB Paru terkonfirmasi bakteriologis yang tercatat. Sembuh yaitu pasien TB Paru dengan hasil pemeriksaan bakteriologis positif pada awal pengobatan, yang hasil pemeriksaan bakteriologis pada akhir pengobatan menjadi negatif pada salah satu pemeriksaan sebelumnya. Angka keberhasilan program TB Paru diidentikkan dengan Angka keberhasilan pengobatan TB Paru.

Angka keberhasilan pengobatan TB (*success rate*) adalah penderita TB yang ditemukan dan diobati pada kurun waktu 10 – 15 bulan yang lalu (menurut Buku Pedoman Nasional Penanggulangan TB), sehingga data yang dievaluasi pada tahun 2019 adalah penderita TB yang ditemukan dan diobati pada tahun 2018, yaitu sebesar 89,2%. Target angka keberhasilan pengobatan TB Paru Tahun 2018 adalah 93%. Angka ini dinilai belum mencapai target yang ditetapkan. Adapun ketidakberhasilan dalam pengobatan antara lain disebabkan karena dropout (5%), gagal (1%), pindah (1%) dan meninggal (4%).

**Angka Keberhasilan Pengobatan TB Di Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2015 – 2018**



Sumber : Seksi Penyakit Menular

Trend angka keberhasilan pengobatan TB paru dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 cenderung fluktuatif. Realisasi angka keberhasilan pengobatan TB paru tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 berturut-turut adalah 86,44%, 89,64%, 88,34% dan 89,19%.

1) Akreditasi Puskesmas

Akreditasi adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi standar Akreditasi. Tujuan akreditasi adalah meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien; meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan, masyarakat dan lingkungannya, serta Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi sebagai institusi; dan meningkatkan kinerja Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi dalam pelayanan kesehatan perseorangan dan atau kesehatan masyarakat.

Terdapat 9 bab sebagai instrument penilaian akreditasi yang terdiri dari administrasi manajemen, upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).

1. Administrasi Manajemen meliputi sistem penyelenggaraan Puskesmas, sarana prasarana, lokasi yang sesuai standar, ketenagaan dan pemeliharaan sarana prasarana
2. Upaya kesehatan masyarakat meliputi sistem penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat, komunikasi koordinasi dengan lintas sektor maupun lintas program, pelaksanaan dan evaluasi program di masyarakat.
3. Upaya kesehatan perorangan meliputi layanan kinis sesuai standar, obat, laboratorium, peralatan klinis, alat kesehatan sesuai standar, proses peningkatan dan pengembangan kompetensi bagi tenaga klinis

4. Mutu yang merupakan mutu puskesmas secara keseluruhan yaitu perbaikan mutu dan kinerja penyelenggaraan pelayanan Puskesmas baik di masyarakat maupun klinis perorangan secara berkesinambungan (continues quality improvement) untuk itu seluruh karyawan berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan yang berfokus pada pelanggan, memperhatikan keselamatan pelanggan, dan melakukan penyempurnaan yang berkelanjutan

Klasifikasi kelulusan akreditasi :

- (1) PARIPURNA → Apabila semua standar dipenuhi lebih dari 80%
- (2) UTAMA → Apabila sistem pengelolaan Puskesmas, ukm dan ukp dijalankan lebih dari 80% dan mutu dijalankan lebih dari 60%
- (3) MADYA → Apabila sistem pengelolaan Puskesmas, ukm dan ukp dijalankan lebih dari 75% dan mutu dijalankan lebih dari 40%
- (4) DASAR → Apabila sistem pengelolaan Puskesmas, ukm dan ukp dijalankan lebih dari 75% dan mutu dijalankan lebih dari 20%
- (5) TIDAK TERAKREDITASI → Apabila sistem pengelolaan Puskesmas, ukm dan ukp dijalankan kurang dari 75% dan mutu dijalankan kurang dari 20%

Sebanyak 26 Puskesmas yang ada di Kabupaten Sidoarjo semuanya telah berstatus akreditasi pada tahun 2018.

Puskesmas yang telah terakreditasi sebanyak 26 tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Terakreditasi Paripurna sebanyak 2 Puskesmas
- b. Terakreditasi Utama sebanyak 16 Puskesmas.
- c. Terakreditasi Madya sebanyak 6 Puskesmas.
- d. Terakreditasi Dasar sebanyak 2 Puskesmas.

Puskesmas yang telah terakreditasi paripurna adalah Puskesmas Taman dan Jabon, sedangkan puskesmas dengan akreditasi dasar adalah Puskesmas Prambon dan Puskesmas Candi.

Dinas Kesehatan berupaya untuk selalu mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan yang ada, melalui akreditasi dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. melakukan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan secara berkala sesuai dengan standar yang ada.
- b. pengajuan reakreditasi bagi Puskesmas yang telah 3 tahun terakreditasi.
- c. memotivasi Puskesmas untuk terakreditasi paripurna.
- d. melakukan monitoring evaluasi pasca akreditasi untuk meningkatkan pencapaian standar Akreditasi secara berkesinambungan.

2) Presentase Penduduk Mempunyai Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pada tahun 2019 seluruh masyarakat Indonesia harus sudah mempunyai Jaminan Kesehatan. Jaminan kesehatan tersebut bisa dari pemerintah maupun swasta. Ini sesuai dengan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2017 bahwa Bupati dan walikota agar mengalokasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, memastikan seluruh penduduknya terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional, menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas di wilayah masing-masing serta lain hal sebagainya yang diatur dalam peraturan tersebut.

Pada tahun 2019 sebanyak 71,8% dari jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo sudah memiliki Jaminan Kesehatan, baik yang berasal dari Pemerintah, swasta maupun mandiri. Jaminan kesehatan dari pemerintah untuk masyarakat miskin berasal dari pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang akan diupayakan semuanya terintegrasi dalam BPJS. Hal ini sudah meningkat dibanding tahun 2018 yang masih mencapai 70,25%.

RSUD Kabupaten Sidoarjo menerapkan pola BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), yaitu sistem yang diterapkan oleh RSUD Kabupaten Sidoarjo sebagai Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Di mana RSUD dengan pola BLUD mengelola hasil pendapatannya sendiri untuk menjalankan operasionalnya, yang bertujuan untuk terwujudnya optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dan terwujudnya kemandirian RSUD dalam keuangan dan investasi. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator keuangan dan indikator kinerja layanan kesehatannya yang keberhasilan kinerjanya diukur sebagai berikut :

1. Keuangan RSUD

Cost Recovery Rate (CRR)

Cost Recovery Rate (CRR) digunakan untuk mengukur kontribusi pendapatan fungsional terhadap belanja operasional pelayanan. Selain itu, CRR dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana pendapatan fungsional rumah sakit mampu membiayai kegiatan operasional pelayanan termasuk gaji pegawai Rumah Sakit. Indikator ini mencerminkan efisiensi penggunaan dana

operasional Rumah Sakit dalam melayani pasien. Bila nilai CRR di atas 100% maka CRR-nya baik.

Capaian CRR tanpa subsidi gaji :

TAHUN	PENDAPATAN (Rp)	BELANJA OPERASIONAL (Rp)	CRR
2017	416.523.355.646,81	390.528.622.978,55	106,66%
2018	428.423.686.316,37	410.811.551.063,58	104,29%
2019	432.851.327.241,02	434.486.807.492,92	99,62%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa CRR (subsidi gaji tidak diperhitungkan) tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami penurunan. Pada tahun 2019, CRR (tanpa subsidi gaji) mengalami penurunan menjadi 99,62%.

Capaian CRR dengan subsidi gaji :

TAHUN	PENDAPATAN (Rp)	BELANJA OPERASIONAL (Rp)	CRR
2017	416.523.355.646,81	435.259.261.048,55	95,70%
2018	428.423.686.316,37	455.395.429.753,58	94,08%
2019	432.851.327.241,02	483.167.657.492,92	89,59%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa CRR (subsidi gaji diperhitungkan) pada tahun 2017 hingga 2019 mengalami penurunan dan berada pada nilai kurang dari 100%. Pada tahun 2019, capaian CRR RSUD Kabupaten Sidoarjo sebesar 89,59%.

Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi biaya pada setiap unit agar dapat dilakukan pengendalian biaya, sehingga pendapatan yang diperoleh dapat membiayai semua kegiatan yang ada. Dengan harapan bahwa semua biaya yang dikeluarkan bisa untuk menghasilkan pendapatan dan dapat mengurangi atau menghilangkan biaya yang tidak perlu.

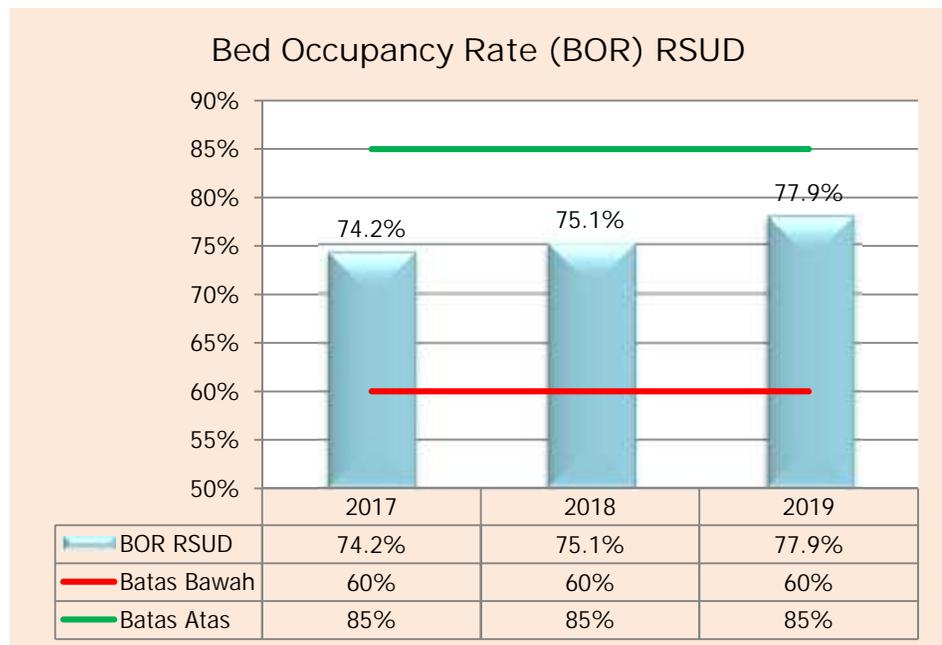
2. Kualitas RSUD

a) Bed Occupancy Ratio (BOR)

Bed Occupancy Ratio (BOR) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat tinggi rendahnya pemanfaatan tempat tidur rumah sakit dalam kurun waktu tertentu. Tingkat pemanfaatan diukur dari penggunaan tempat tidur yang tersedia.

Standar BOR ideal yang ditetapkan oleh Kemenkes RI untuk setiap rumah sakit sebesar 60-85%. Hal ini menggambarkan ketika tingkat

pemanfaatan tempat tidur kurang dari 60%, maka rumah sakit tersebut kurang diminati oleh masyarakat. Sedangkan bila lebih dari 85% dikhawatirkan akan mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan.

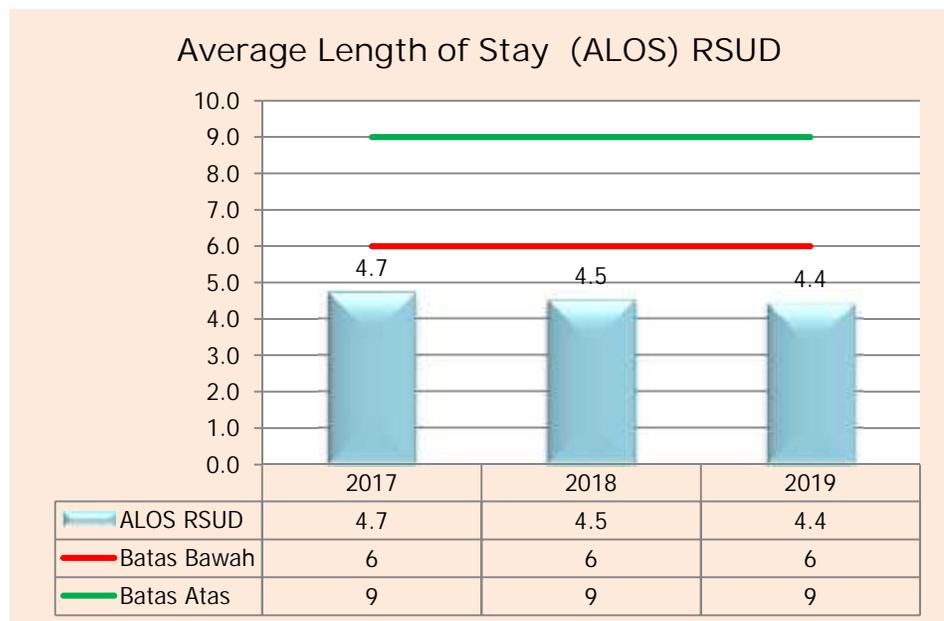


Sumber Data : RSUD Kabupaten Sidoarjo

Dari grafik tersebut, terlihat bahwa realisasi BOR RSUD Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2019 berada di angka 77,9%, angka yang ideal untuk pelayanan kepada masyarakat ditunjukkan pula pada tahun 2018 dengan capaian 75,1% dan pada tahun 2017 dengan capaian 74,2%. Selama 3 tahun terakhir, capaian BOR di RSUD Kabupaten Sidoarjo tetap berada di kisaran target yang ditetapkan dan akan selalu diupayakan untuk menjaga BOR berada dalam kisaran target 60-85%.

b) Average Length of Stay (ALOS)

ALOS merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur rata-rata lama waktu pasien mendapat perawatan. Standar ALOS ideal oleh Kemenkes RI untuk seluruh rumah sakit termasuk di RSUD Kabupaten Sidoarjo sebesar 6-9 hari. Nilai ALOS yang rendah mengindikasikan kualitas layanan kesehatan baik dan secara ekonomi akan mengurangi cost yang dikeluarkan seorang pasien, sedangkan nilai ALOS yang tinggi mengindikasikan lambatnya penanganan pasien oleh tenaga medis.

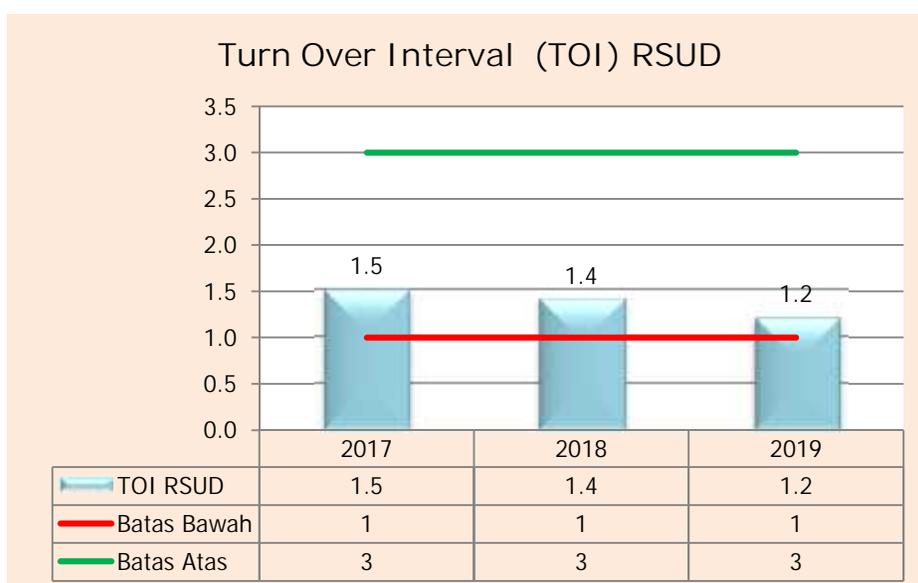


Sumber Data : RSUD Kabupaten Sidoarjo

Capaian ALOS pada tahun 2019 berada pada nilai 4,4 hari, sedangkan pada tahun 2018 capaian ALOS sebesar 4,5 hari dan pada tahun 2017 berkisar pada 4,7 hari. Selama 3 tahun terakhir, nilai ALOS berada pada kisaran 4,4 – 4,7 hari. Nilai ALOS RSUD Kabupaten Sidoarjo yang berada di bawah standar Kemenkes RI dikarenakan pasien yang dirawat di RSUD Kabupaten Sidoarjo memiliki ALOS kurang dari 6 hari. Hal ini berdasarkan data 10 besar diagnosis penyakit rawat inap yang memiliki rata-rata waktu perawatan pasien selama 4-5 hari. Selain itu, rendahnya nilai ALOS dapat bermakna bahwa pelayanan diberikan secara cepat dan tepat sehingga pasien dapat segera pulih.

c) Turn Over Interval (TOI)

Turn Over Interval (TOI) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur waktu rata-rata tempat tidur kosong atau waktu antara satu tempat tidur ditinggalkan oleh pasien sampai ditempati lagi oleh pasien lain. Interval ini dimaksudkan agar diperoleh waktu yang cukup untuk persiapan pergantian pasien baru sehingga tidak terjadi infeksi nosokomial. Standar yang ditetapkan Kemenkes RI untuk TOI sebesar 1-3 hari.

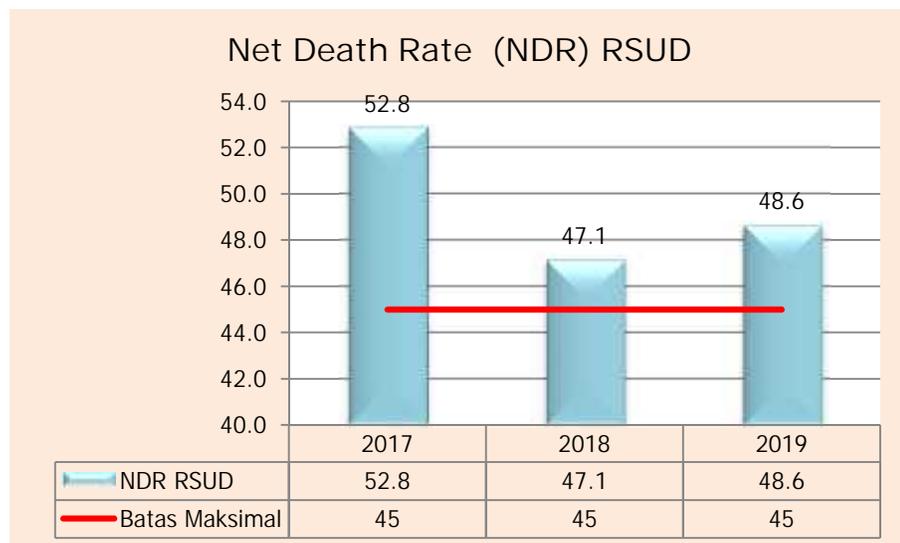


Sumber Data : RSUD Kabupaten Sidoarjo

Realisasi yang dicapai oleh RSUD Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2019 adalah 1,2 hari yang artinya rata-rata tempat tidur tidak dihuni pasien selama 1,2 hari. Hal ini menunjukkan bahwa TOI RSUD Kabupaten Sidoarjo masuk dalam kategori ideal karena masih berada dalam kisaran standar 1-3 hari. Angka TOI tahun 2018 sebesar 1,4 hari dan tahun 2017 sebesar 1,5 hari menunjukkan selama 3 tahun terakhir capaian TOI sudah ideal karena masih berada dalam kisaran standar. Oleh karena itu, RSUD Kabupaten Sidoarjo tetap harus memperhatikan proses sterilisasi ruangan sebelum digunakan kembali sehingga tidak berdampak kepada menurunnya mutu pelayanan rumah sakit.

d) Net Death Rate (NDR)

Net Death Rate (NDR) merupakan salah satu Key Performance Indicator sebuah rumah sakit. Meningkatnya NDR pada suatu rumah sakit merupakan sebuah indikasi telah terjadi penurunan kinerja yang berakibat menurunnya kualitas atau mutu pelayanan di rumah sakit tersebut. Adapun perkembangan NDR pada RSUD Kabupaten Sidoarjo sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :



Sumber Data : RSUD Kabupaten Sidoarjo

NDR diperoleh dari jumlah pasien keluar mati >48 jam dibagi dengan jumlah pasien keluar hidup dan mati dikalikan 1.000‰. Pada tahun 2019, jumlah pasien keluar mati >48 jam sebanyak 2.379 orang. Sedangkan jumlah pasien keluar hidup dan mati sebanyak 48.999 orang, sehingga diperoleh NDR sebesar 48,6‰.

Realisasi NDR tahun 2019 sebesar 48,6‰ dari target yang ditetapkan sebesar 45‰. NDR pada tahun 2019 yang tinggi disebabkan oleh kondisi pasien pra rujukan yang datang sudah dalam kondisi kritis. Data pasien pra rujukan dalam kondisi kritis merujuk pada level Emergency Severity Index (ESI) atau Indeks Kegawatdaruratan. Semakin rendah angka ESI maka semakin membahayakan nyawa seseorang. Pada tahun 2019, pasien dengan ESI level 1 dan 2 atau pasien dengan kondisi buruk yang masuk ke RSUD Kabupaten Sidoarjo sebesar 8,61%. Instalasi Gawat Darurat (IGD) melayani pasien True Emergency (ESI level 1, 2, 3 dan 4) pada tahun 2019 sebanyak 99,01% dari total kunjungan IGD.

Selain disebabkan karena kondisi pasien pra rujukan yang datang sudah dalam kondisi kritis, tingginya NDR juga disebabkan oleh RSUD Kabupaten Sidoarjo yang menjadi salah satu dari 7 (tujuh) pusat rujukan regional di Jawa Timur. Sehingga pasien yang masuk ke RSUD Kabupaten Sidoarjo tidak murni berasal dari Kabupaten Sidoarjo saja, namun juga berasal dari luar Kabupaten Sidoarjo. Sebagai contoh, pasien dalam kondisi kritis yang berasal dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain di wilayah Pasuruan dan Mojokerto akan dirujuk dengan tujuan utama RSUD

Kabupaten Sidoarjo. Sehingga, pasien keluar mati >48 jam dalam perhitungan NDR bisa juga berasal dari luar Kabupaten Sidoarjo.

Upaya yang akan dilakukan oleh RSUD Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan pelayanan antara lain:

- Optimalisasi layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) 4 lantai, layanan Gedung Baru Hemodialisis 4 lantai dengan kapasitas 100 tempat tidur; dan 11 kamar operasi baru di Gedung Instalasi Bedah Sentral;
- Penggunaan alat-alat kesehatan yang berteknologi canggih untuk menunjang pelayanan seperti USG 4D (Ultrasonografi), Transcranial Magnetic Stimulation (TMS), Echokardiografi, dan Elektroensefalogram (EEG); dan CT-Scan 128 Slices;
- Pengembangan dan optimalisasi layanan Cathlab, Home Care Service, Instalasi Pelayanan Intensif Terpadu (IPIT), Laparoscopy, Endoscopy, Klinik Estetika, layanan Stroke Unit, layanan Geriatri, dan Pain Center;
- Monitoring yang berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditentukan (Panduan Pelayanan Klinik, Clinical Pathway, Daftar Obat Medik dan Audit Medik);
- Optimalisasi PPI (Pengendalian dan Pencegahan Infeksi), K3RS (Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit), dan PPRA (Program Pengendalian Resistensi Antimikroba);
- Pengadaan Alat Kedokteran MRI 3 tesla;
- Pembangunan Gedung Radioterapi Onkologi Terpadu, Gedung Parkir Pengunjung 4 lantai, drainase dan bozem;
- Renovasi gedung CSSD dan Laundry, Gudang Umum dan Farmasi, serta Perluasan Parkir Pegawai.

e) Persentase Pasien Keluar Hidup

Pasien Keluar Hidup merupakan indikator kinerja RSUD Kabupaten Sidoarjo hasil dari Reviu Renstra pada Tahun 2017. Indikator ini menggambarkan jumlah pasien keluar hidup yang dirawat inap di RSUD Kabupaten Sidoarjo dalam 1 (satu) tahun. Indikator ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah pasien keluar hidup dengan jumlah pasien masuk rawat inap dikalikan 100%. Pada tahun 2019, jumlah pasien keluar hidup sebanyak 55.119 orang, sedangkan jumlah pasien masuk rawat inap sebanyak 58.853 orang. Sehingga diperoleh hasil Persentase Pasien Keluar Hidup sebesar 93,7%.



Sumber Data : RSUD Kabupaten Sidoarjo

Dari grafik tersebut, dapat dilihat bahwa pada tahun 2016-2018 Persentase Pasien Keluar Hidup mengalami peningkatan, sedangkan di tahun 2019 mengalami penurunan. Secara keseluruhan, mulai dari tahun 2016 hingga 2019 Persentase Pasien Keluar Hidup belum mencapai target.

Salah satu penyebab belum tercapainya target indikator Persentase Pasien Keluar Hidup adalah tingginya Net Death Rate (NDR) pada tahun 2019. NDR diperoleh dari jumlah pasien keluar mati >48 jam dibagi jumlah pasien keluar hidup dan mati dikalikan 1.000‰. Realisasi NDR tahun 2019 sebesar 48,6‰ melebihi target yang ditetapkan yakni sebesar 45‰. NDR yang tinggi disebabkan oleh kondisi pasien pra rujukan yang datang sudah dalam kondisi kritis. Data pasien pra rujukan dalam kondisi kritis merujuk pada level Emergency Severity Index (ESI) atau Indeks Kegawatdaruratan. Semakin rendah angka ESI maka semakin membahayakan nyawa seseorang. Pada tahun 2019, pasien dengan ESI level 1 dan 2 atau pasien dengan kondisi buruk yang masuk ke RSUD Kabupaten Sidoarjo sebesar 8,61%. Instalasi Gawat Darurat (IGD) melayani pasien True Emergency (ESI level 1, 2, 3 dan 4) pada tahun 2019 sebanyak 99,01% dari total kunjungan IGD.

Selain disebabkan oleh kondisi pasien pra rujukan yang datang dalam kondisi kritis, tingginya NDR juga disebabkan oleh RSUD Kabupaten Sidoarjo yang menjadi salah satu dari 7 (tujuh) pusat rujukan regional di Jawa Timur. Sehingga pasien yang masuk ke RSUD Kabupaten Sidoarjo tidak murni berasal dari Kabupaten Sidoarjo saja, namun juga berasal dari

luar Kabupaten Sidoarjo. Sebagai contoh, pasien dalam kondisi kritis yang berasal dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain di wilayah Pasuruan dan Mojokerto akan dirujuk dengan tujuan utama RSUD Kabupaten Sidoarjo. Sehingga, pasien keluar mati >48 jam dalam perhitungan NDR bisa juga berasal dari luar Kabupaten Sidoarjo.

f) Status Akreditasi Rumah Sakit

Status Akreditasi Rumah Sakit adalah pengakuan yang diberikan kepada Rumah Sakit oleh Pemerintah melalui badan yang berwenang dalam hal ini Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) untuk memenuhi standar pelayanan dengan tingkat kelulusan yang telah ditentukan. Pada Tahun 2017, RSUD Kabupaten Sidoarjo melaksanakan Akreditasi yang kedua dengan hasil sebagai berikut :

Tahun	Status Akreditasi Rumah Sakit	Keterangan
2014	Paripurna	Akreditasi ke-I
2017	Paripurna	Akreditasi ke-II

Data tersebut menunjukkan bahwa RSUD Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan akreditasi yang pertama tahun 2014 dengan hasil paripurna dan akreditasi kedua pada tahun 2017 dengan hasil paripurna pula. Penilaian akreditasi berlaku selama 3 (tiga) tahun untuk kemudian dilakukan reakreditasi. Tingkat paripurna adalah tingkat kelulusan tertinggi yang dapat diraih oleh rumah sakit.

Rumah Sakit dikatakan lulus akreditasi paripurna apabila memenuhi 15 (lima belas) standar akreditasi Rumah Sakit versi 2012 dengan nilai minimum 80%. 15 standar akreditasi rumah sakit versi 2012 meliputi:

- 1) Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) Rumah Sakit;
- 2) Hak Pasien dan Keluarga (HPK);
- 3) Pendidikan Pasien dan Keluarga (PPK);
- 4) Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP);
- 5) Millenium Development Goal's (MDG's);
- 6) Akses Pelayanan dan Kontinuitas pelayanan (APK);
- 7) Asesmen Pasien (AP);
- 8) Pelayanan Pasien (PP);
- 9) Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB);

- 10) Manajemen Penggunaan Obat (MPO);
- 11) Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI);
- 12) Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS);
- 13) Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI);
- 14) Tata Kelola, Kepemimpinan dan Pengarahan (TKP);
- 15) Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK).

Pada tahun 2017, RSUD Kabupaten Sidoarjo telah melakukan akreditasi yang kedua dengan nilai 92,6% dari target Renstra RSUD sebesar 80%. Pada tanggal 13-14 November 2019, RSUD Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan survei verifikasi akreditasi dan tetap memperoleh status Akreditasi Paripurna sesuai Akreditasi RS tahun 2017.

Akreditasi ke-3 (tiga) akan dilaksanakan pada tahun 2020 dengan target Status Terakreditasi Internasional sesuai Rencana Strategis RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021. Rumah sakit dikatakan memperoleh Status Akreditasi Internasional apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Rumah sakit harus sudah lulus akreditasi nasional dengan hasil paripurna.
- b. Nilai untuk setiap standar akreditasi harus mencapai 95%. Berdasarkan hasil survei akreditasi tahun 2017 oleh KARS, standar akreditasi rumah sakit yang belum mencapai nilai 95% yaitu SKP, HPK, PMKP, MDG's, PP, MPO, KPS, PPI, TKP, dan MFK. Untuk mencapai nilai 95% upaya yang dilakukan yaitu optimalisasi pelaksanaan pelayanan dan menindaklanjuti catatan-catatan dari hasil survei verifikasi akreditasi tahun 2019.
- c. Rumah Sakit harus tetap melaksanakan Program Nasional meliputi:
 - 1) Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi dan Peningkatan Kesehatan Ibu dan Bayi melalui aplikasi Si-Manies (Sidoarjo Maternal Neonatal Emergency SMS Gateway) sehingga pasien rujukan tidak lagi mengalami keterlambatan penanganan yang disebabkan oleh penuhnya kapasitas daya tampung fasilitas, tidak adanya sarana, tidak adanya dokter spesialis di fasilitas yang langsung menangani pasien rujukan maupun faktor lainnya;

- 2) Penurunan Angka Kesakitan HIV/AIDS dengan adanya klinik khusus untuk pasien HIV/AIDS yaitu Klinik Mawar Merah;
- 3) Penurunan Angka Kesakitan Tuberkulosis melalui Klinik Paru yang menyediakan fasilitas pengobatan Tuberkulosis dan Tuberkulosis MDR (Multi Drug Rersistent);
- 4) Pengendalian Resistensi Antimikroba dengan adanya Komite PPRA (Program Pengendalian Resistensi Antimikroba);
- 5) Pelayanan Geriatri dengan adanya Klinik Geriatri;
- 6) Integrasi Pendidikan Kesehatan dalam Pelayanan Rumah Sakit melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Sekolah Kesehatan, serta di tahun 2016 RSUD Kabupaten Sidoarjo telah memperoleh Status Akreditasi Rumah Sakit Pendidikan dengan nilai A yang berlaku selama 5 tahun.

Upaya-upaya peningkatan status akreditasi baik dari aspek kualitas maupun pelayanan, antara lain :

- a. Melakukan inovasi dan terobosan di bidang pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, misalnya aplikasi Si Maneis (Sidoarjo Maternal Neonatal Emergency SMS Gateway), SANtri Android RS (Sistem Antrian Android Rumah Sakit), InKamRS, e-Tamat (Elektronik Akta Kematian), Alamak (Anak Lahir Membawa Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga), ReMics (Rekam Medis Elektronik); Aplikasi SantriRS yang berbasis android; Pengembangan aplikasi pelayanan publik seperti Public Safety Center 119 (PSC 119) yang terintegrasi dengan SiManeis, Health Command Center, e-Medivo Complain, dan Bridging Vendika BPJS;
- b. Peningkatan dan penambahan sarana prasarana kesehatan yang berteknologi canggih untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, misalnya USG 4D (Ultrasonografi), Transcranial Magnetic Stimulation (TMS), Echokardiografi, Elektroensefalogram (EEG), pengembangan vascular center dan layanan CT-Scan 128 Slices;
- c. Penguatan kapasitas kelembagaan;
- d. Peningkatan SDM yang kompeten di bidangnya;
- e. Optimalisasi Tim dan Komite yang ada di rumah sakit;

- f. Monitoring yang berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditentukan (Panduan Praktik Klinik, Clinical Pathway, Daftar Obat Medik dan Audit Medik).

g) Status Akreditasi Rumah Sakit Pendidikan

Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. RSUD Kabupaten Sidoarjo juga menjadi Rumah Sakit Pendidikan sejak tahun 2013 dan sudah melakukan akreditasi sebagai rumah sakit pendidikan sejak tahun 2013. Status akreditasi Rumah Sakit Pendidikan yang telah dicapai sebagai berikut :

Tahun	Status Akreditasi Rumah Sakit Pendidikan
2013	B (berlaku 3 tahun)
2016	A (berlaku 5 tahun)

Akreditasi Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Kabupaten Sidoarjo yang terakhir dilakukan pada tahun 2016 dengan hasil akreditasi A. Status Akreditasi A berlaku selama 5 tahun (2016 – 2021). Status akreditasi Rumah Sakit Pendidikan A harus memenuhi standar sebagai berikut:

1. Standar Visi, Misi, Komitmen dan Persyaratan;
2. Standar Manajemen dan Administrasi;
3. Standar Sumber Daya Manusia untuk program pendidikan klinik;
4. Standar penunjang pendidikan;
5. Standar perancangan dan pelaksanaan program pendidikan klinis yang berkualitas.

Dengan nilai pencapaian Standar Rumah Sakit Pendidikan antara 79%-100%, pada tahun 2016 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo memperoleh nilai 90% dari target 90% sesuai dengan Rencana Strategis RSUD Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021.

2. SKPD Penyelenggara Urusan

Urusan kesehatan ini dilaksanakan oleh SKPD yaitu Dinas Kesehatan dengan Perangkat Puskesmasnya dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.

3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia untuk urusan kesehatan Kabupaten Sidoarjo berjumlah 1.461 orang dari Dinas Kesehatan dan 692 orang dari RSUD. Secara rinci SDM penyelenggara urusan pendidikan menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

Untuk jabatan fungsional yang tersedia di Dinas Kesehatan :

1. Administrator Kesehatan
2. Apoteker
3. Asisten Apoteker
4. Bidan
5. Dokter Gigi
6. Dokter Umum
7. Nutrisionis
8. Perawat
9. Perawat Gigi
10. Pranata Komputer
11. Pranata Laboratorium Kesehatan
12. Refraksionis
13. Sanitarian
14. Teknisi Elektromedis

Sedangkan untuk jabatan fungsional di RSUD, diantaranya :

1. Administrator Kesehatan
2. Apoteker
3. Asisten Apoteker
4. Bidan
5. Dokter Gigi
6. Dokter Pendidik Klinis
7. Dokter Spesialis
8. Dokter Umum
9. Fisioterapis
10. Nutrisionis
11. Perawat

12. Perawat Gigi
13. Perekam Medis
14. Pranata Komputer
15. Pranata Laboratorium Kesehatan
16. Radiografer
17. Refraksionis
18. Sanitarian
19. Teknisi Elektromedis

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran (per program)

Secara rinci anggaran dan realisasi masing masing program sebagaimana terlampir.

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 28,304,828,061.00	Rp 22,336,762,029.00	78.92%
2	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Rp 69,715,669,672.00	Rp 49,937,036,456.00	71.63%
3	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp 4,776,022,996.00	Rp 4,164,310,241.00	87.19%
4	Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Rp 30,211,401,769.68	Rp 27,553,076,976.00	91.20%
5	Program Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas	Rp 119,121,756,719.31	Rp 101,459,534,040.00	85.17%
6	Program Peningkatan Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah	Rp 541,271,456,631.42	Rp 456,243,389,831.51	84.29%

5. Proses Perencanaan

Proses perencanaan urusan kesehatan dilaksanakan secara partisipatif dengan diawali masukan dari puskesmas, dinas kesehatan dan Rumah Sakit. Untuk Rumah Sakit karena di Sidoarjo rumah sakit daerah sudah berbentuk BLUD, maka rumah sakit dalam perencanaan, pelaksanaan maupun monitoringnya dilakukan secara mandiri yaitu terpisah dengan Dinas Kesehatan.

6. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit adalah sebagaimana terlampir

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Program

Program pembangunan untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilaksanakan pada tahun 2019 adalah :

1. Program Penyusunan Perencanaan teknis dan Pengolaan Data ke-PU-an
2. Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan
3. Program Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Jaringan irigasi, pematuan dan pengendalian Banjir
4. Program penataan bangunan
5. Program Pengawasan Bangunan

2. Realisasi Pelaksanaan Program serta Permasalahan dan Solusinya

Hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada pencapaian indikator sebagai berikut :

Prosentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap

Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan maka pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus menyediakan jalan dan jembatan bagi masyarakat. Panjang jalan kabupaten sampai dengan tahun 2019 sepanjang 1012,08 km. Adapun Jalan Mantap itu sendiri adalah jalan dengan kondisi konstruksi yang mana untuk penanganannya hanya membutuhkan kegiatan pemeliharaan. Jalan mantap konstruksi ditetapkan menurut Standar Pelayanan Minimal adalah jalan dalam kondisi baik dan sedang, dengan besar IRI < 6 m/km (*Parameter kerataan jalan atau International Roughness Index*). Sedangkan Jalan Tak Mantap Konstruksi adalah jalan dengan kondisi di luar koridor mantap yang mana untuk penanganan minimumnya adalah pemeliharaan berkala dan maksimum peningkatan jalan dengan tujuan untuk menambah nilai struktur konstruksi. Berikut kondisi seluruh jalan kabupaten baik mantap maupun tak mantap sebagai berikut :

No	Kondisi	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
1	Baik	849,446	84,6	887,153	87,9	826,68	81,68	683,037	67,49
2	Sedang	107,5	10,7	80,581	8,0	115,15	11,38	242,808	23,99
Jalan Mantap		956,946	95,3	967,734	95,9	941,83	93,06	925,845	91,48
3	Rusak	47,006	4,7	41,946	4,1	70,25	6,94	86,217	8,52%
Jumlah		1003,95	100	1009,68	100	1012,08	100	1012,08	100%

Meskipun pada pembangunan jalan nilai realisasinya rendah dikarenakan masih ada Pembangunan Jalan Frontage Road Waru-Buduran belum dapat direalisasikan. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi kondisi jalan mantap yang ada di kabupaten Sidoarjo, karena sebagian besar Jalan yang ada sudah masuk kategori Jalan Mantap.

Untuk tahun 2019 kondisi jalan mantap mengalami penurunan dan kondisi jalan rusak mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018. Hal ini disebabkan karena :

1. Anggaran dialihkan kedalam kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan dengan kontruksi Jalan beton dengan maksud untuk memperpanjang umur teknis jalan, sehingga anggaran penanganan jalan rusak melalui swakelola dan pemeliharaan rutin jalan banyak terserap di kegiatan atas.
2. Harga satuan untuk pembangunan jalan beton lebih tinggi dari jalan aspal, sehingga pembangunan yang diperoleh juga tidak sepanjang menggunakan harga satuan jalan aspal.
3. Adanya penetapan PAPBD yang terlambat, sehingga penyerapan anggaran tidak optimal.
4. Terdapat kegiatan Peningkatan Jalan yang gagal lelang dan peningkatan jembatan yang mengalami putus kontrak dikarenakan penyedia wanprestasi.



Sumber Data : Dinas PUBMSDA Kab. Sidoarjo

Meskipun begitu target tahun 2019 kondisi jalan kabupaten dalam kondisi mantap 87% dapat terealisasikan menjadi 91,48%, sehingga capaian atas target tersebut sebesar 105,14 %.

Adapun pada tahun 2019 upaya yang dilakukan untuk meningkatkan panjang jalan dalam kondisi mantap, antara lain :

1. Kegiatan Pembangunan Jalan sepanjang 1.458 meter dengan biaya Rp.25.800.216.166,00;
2. Kegiatan Peningkatan Jalan sepanjang 20.350 meter dengan biaya Rp.86.151.303.979,00;
3. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan sepanjang 133.543 meter dengan biaya Rp.37.958.455.427,72.

Prosentase kecukupan kebutuhan air irigasi

Luas baku sawah Kabupaten Sidoarjo yang merupakan Daerah irigasi (DI) Delta Brantas pada tahun 2019 seluas 21,371 Ha, dengan kebutuhan air irigasi sebesar 17.745 liter/detik sesuai Rencana Tata Tanam Global (RTTG) Tahun 2019 sedangkan ketersediaan air irigasi untuk wilayah Daerah Irigasi (DI) Delta Brantas sebesar 17.212 liter/detik berdasarkan Pola Operasi Waduk dan Alokasi Air (POWAA) yang dikeluarkan oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) wilayah Sungai Brantas.

Adapun realisasi luas sawah di Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 yang dapat diairi adalah sebagai berikut :

	Target (Ha)	%	Realisasi (Ha)	%
Luas sawah yang dapat diairi	<u>18,227.4</u>	85%	<u>17,737.9</u>	83%
Luas sawah yang ada	21,444.0		21,371.0	

Adapun tahun 2019, layanan irigasi di Kabupaten Sidoarjo dapat terealisasi dengan baik. Hal tersebut dapat diatasi melalui :

1. Pemenuhan air irigasi dari dam/ bendung suplesi yang berada di afvoer maupun bantuan pompa air, sehingga kebutuhan air dapat dicukupi.
2. Pengaturan operasional DAM penerus sesuai dengan kebutuhan pola tata tanam
3. Pemberian air yang dilakukan secara terus menerus maupun dengan pola giliran sesuai ketersediaan debit yang ada.

Cakupan layanan irigasi tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Cakupan Layanan irigasi Tahun 2019

URAIAN	ketersediaan (liter/detik)	kebutuhan (liter/detik)	%
2016	20235.56	23262.10	86.99%
2017	15185.00	16777.00	90.51%
2018	11668.00	12785.00	91.26%
2019	17212.00	17745.00	96,99%

Prosentase luasan genangan/ banjir tertangani

Adapun target tahun 2019 adalah sebesar 65%, sedangkan tahun 2019 kondisi genangan di Kabupaten Sidoarjo adalah 523,4 Ha, jadi realisasi hanya 53,3% yang diperoleh dari 523,4 Ha / 982 Ha. Sehingga capaian atas realisasi dibagi target adalah 85%.

Target	Realisasi	Capaian
65%	53,3%	82%

Untuk mengendalikan genangan / banjir di Kabupaten Sidoarjo yang merupakan daerah delta telah dilakukan pengendalian/ penanganan secara koordinatif antar dinas terkait.

Upaya yang telah dilakukan antara lain :

1. Ketepatan dalam manajemen pengelolaan air
2. Normalisasi saluran dan afvoer
3. Operasional dan pemeliharaan pintu – pintu air pada Dam / bending
4. Operasional rumah pompa / busem
5. Pembangunan dan pemeliharaan saluran pembuang yang menuju afvoer utama

Rincian lebih lanjut lokasi genangan yang terjadi sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Lokasi Genangan

	Lokasi	2016 (Ha)	2017 (Ha)	2018 (Ha)	2019 (Ha)
1	Pertanian	509	490	405	471,4
2	Permukiman	90	82	68	52
	Jumlah	599	572	503	523,4

Adapun Grafiknya adalah sebagai berikut :



Sumber Data : Dinas PUBMSDA Kab. Sidoarjo

Penurunan luas genangan baik di pertanian dan pemukiman juga dikarenakan koordinasi antar *stakeholder*. Selain itu upaya penurunan genangan diantaranya adalah adanya peran serta pengembang untuk menyediakan lahan resapan/buzem serta peran masyarakat tidak membuang sampah di saluran, sehingga air yang tergenang dapat mengalir pada saluran yang tersedia.

c. SKPD penyelenggara Urusan

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan oleh SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air; serta Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Sidoarjo berjumlah 157 orang dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air; serta 25 orang dari Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan pekerjaan umum dan penataan ruang menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

Sedangkan untuk posisi jabatan fungsional tersedia Arsiparis, Teknisi Jalan dan Jembatan, Teknik Pengairan, serta Pranata Komputer.

e. Alokasi dan Realisais Anggaran (per program)

Secara rinci anggaran dan realisasi masing masing program sebagaimana terlampir.

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penyusunan Perencanaan teknis dan Pengolaan Data ke-PU-an	Rp 11,343,325,215.00	Rp 8,317,547,260.00	73.33%
2	Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan	Rp 510,033,637,631.00	Rp 268,652,257,424.72	52.67%
3	Program Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Jaringan irigasi, pematusan dan pengendalian Banjir	Rp 113,221,624,302.00	Rp 73,478,012,387.00	64.90%
4	Program penataan bangunan	Rp 322,126,859,139.07	Rp 176,757,276,597.00	54.87%
5	Program Pengawasan Bangunan	Rp 1,485,988,460.00	Rp 1,235,721,180.00	83.16%

f. Proses Perencanaan

Proses perencanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan melalui usulan dari bidang-bidang untuk kegiatan survey. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi atas pelaksanaan program dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air; serta Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagaimana terlampir.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Program

Program pembangunan untuk urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan pada tahun 2019 adalah Program pembangunan sarana prasarana perumahan dan permukiman

b. Realisasi Pelaksanaan Program serta Permasalahan dan Solusinya

Seluruh program telah dilaksanakan untuk mencapai kinerja sebagai berikut :

Prosentase peningkatan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang

Terjadi peningkatan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang, dari 95 Ha pada tahun 2018 menjadi 200 Ha pada tahun 2019 (dengan besaran target yang berbeda), yaitu sebagai berikut :

Uraian	2018	2019
Target	60 Ha	120 Ha
Realisasi	95 Ha	200 Ha
%	158,34	125



Sumber Data : Dinas P2CKTR Kab. Sidoarjo

Capain kinerja pemanfaatan lahan **sesuai dengan rencana tata ruang secara luasan meningkat walaupun secara prosentase terjadi sedikit penurunan.**

Namun demikian masih terdapat perkembangan pertumbuhan bangunan tidak sejalan dengan Dokumen RTRW, karena banyak terjadi proses pengurusan perijinan dilakukan pada saat proses pembangunan sedang dilaksanakan atau pembangunan sudah selesai baru perijinan diproses.

Persentase peningkatan rumah layak huni

Sampai Tahun 2019 kegiatan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni selain memperoleh bantuan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yaitu melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) juga memperoleh bantuan dari APBD Propinsi yang dilaksanakan oleh KODIM dan dana Corporation Social Responsibility (CSR). Dengan Jumlah rumah yang tidak layak huni sebanyak 443.360 unit, sampai dengan akhir tahun 2019 telah dilakukan rehabilitasi sebanyak 442.857 unit rumah tinggal, atau sekitar 99,89% dari jumlah keseluruhan rumah tinggal di Kabupaten Sidoarjo.

Rincian rumah tidak layak huni yang dilakukan rehabilitasi adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Unit rumah	Keterangan
1	Target Awal rumah tidak layak huni		443.360
2	Jumlah rumah tidak layak huni yang sudah dilakukan rehabilitasi s/d tahun 2014	442.356	
3	Tahun 2015	159	
4	Tahun 2016	70	
5	Tahun 2017	51	
6	Tahun 2018	115	
7	Tahun 2019	105	
8	Jumlah rehabilitasi 2015 - 2019	501	
9	Jumlah seluruh rumah yang direhabilitasi		442.867
10	Sisa yang belum direhabilitasi		503

Secara akumulasi sejak masa RPJMD/Rentra rumah tidak layak huni yang dilakukan rehabilitasi adalah sebagai berikut :

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Realisasi perbaikan RTLH (unit Rumah)	159	229	280	395	501



Sumber Data : Dinas P2CKTR Kab. Sidoarjo

Pada Tahun 2019 telah dilakukan realisasi peningkatan rumah layak huni di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 106 Unit. Sehingga pada akhir tahun 2019 tersebut diketahui terdapat 503 Unit rumah yang belum dilakukan rehabilitasi. Keberhasilan

peningkatan rumah layak huni ini telah banyak dilakukan oleh kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat,

Persentase Prasarana Sanitasi yang disediakan sesuai target

Rumah Tangga yang bersanitasi sehat pada Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2019 berjumlah 421.070 KK. Terdapat kenaikan jumlah rumah tangga yang memiliki sanitasi sehat sebesar 3.405 KK pada Tahun 2019.

Uraian	2017	2018	2019
RT bersanitasi sehat	415.057	417.665	421.070



Sumber Data : Dinas P2CKTR Kab. Sidoarjo

Dengan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo keseluruhan sebesar 2.266.533 jiwa atau 718.982 KK, maka 92,9% penduduk Kabupaten Sidoarjo bersanitasi sehat.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah rumah tangga ber sanitasi sehat, antara lain :

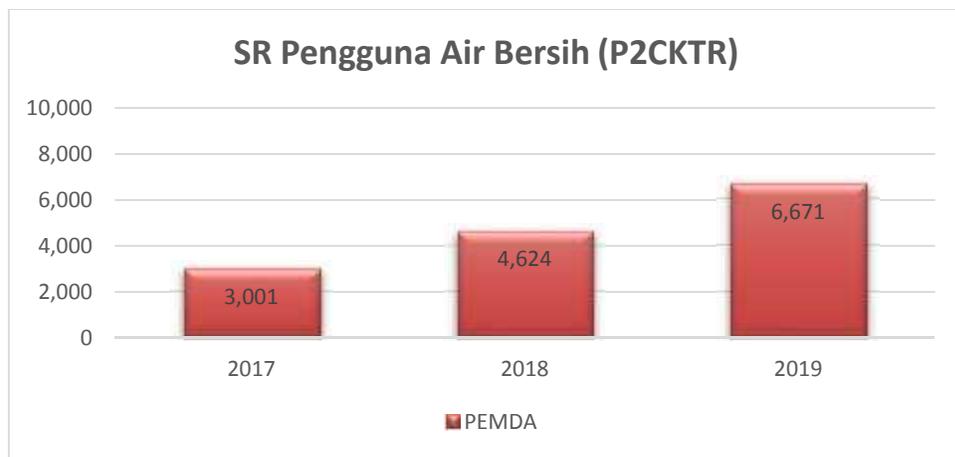
- Pembangunan jamban sehat di wilayah tidak padat penduduk
- Pembangunan IPAL Komunal di wilayah padat penduduk

Persentase prasarana air bersih yang disediakan sesuai target

Untuk tahun 2019 jumlah masyarakat yang terlayani sarana air bersih yang dibangun oleh PDAM sebesar 138.128 SR dan Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar 2.047 SR dengan capaian sebesar 4,45% dari target kewajiban OPD sebesar 10% (RISPAM Kabupaten Sidoarjo), sehingga total SR yang dikelola oleh Pemda sampai dengan akhir tahun 2019 sebesar 6.671 SR/KK.

Uraian	2017	2018	2019
SR pengguna air bersih	134.663	137.094	140.175
PDAM	134.897	137.094	138.128
PEMDA	3.001	4.624	6.671

**SR = Sambungan Rumah*



Sumber Data : Dinas P2CKTR Kab. Sidoarjo

Dapat diketahui bahwa cakupan pelayanan PEMDA Kabupaten Sidoarjo di bawah cakupan pelayanan PDAM. Hingga akhir Tahun 2019 terdapat selisih sebesar 19,62% pencapaian pelayanan antara PDAM dan Pemda Kabupaten Sidoarjo. Namun dari masing-masing pelayanan baik PDAM maupun Pemda Kabupaten Sidoarjo selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan jumlah penduduk terlayani yang cukup signifikan. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo keseluruhan sebesar 2.266.533 jiwa atau 718.982 KK, maka 30,9% penduduk Kabupaten Sidoarjo terlayani air bersih.

Persentase penurunan luasan kawasan kumuh

Hingga tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui SK Bupati No.188/452/404.1.3.2/2015 tanggal 27 April 2015 tentang kawasan permukiman kumuh Kabupaten Sidoarjo menyebutkan bahwa Luasan kawasan kumuh adalah 301,08 Ha.

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Luas Kawasan Kumuh (Ha)	301,08	300,03	298,98	249,85	218.63



Sumber Data : Dinas P2CKTR Kab. Sidoarjo

Pada Tahun 2019 terjadi penurunan luas kawasan kumuh sebesar 69,96% dari keseluruhan luasan kawasan kumuh 301,08 Ha yaitu 31,22. Sehingga didapatkan sisa luasan kawasan kumuh sebesar 218,63 Ha.

Untuk mendukung indikator sasaran tersebut di atas, didukung dengan indikator program yang memberikan kontribusi atas sasaran diatas yaitu :

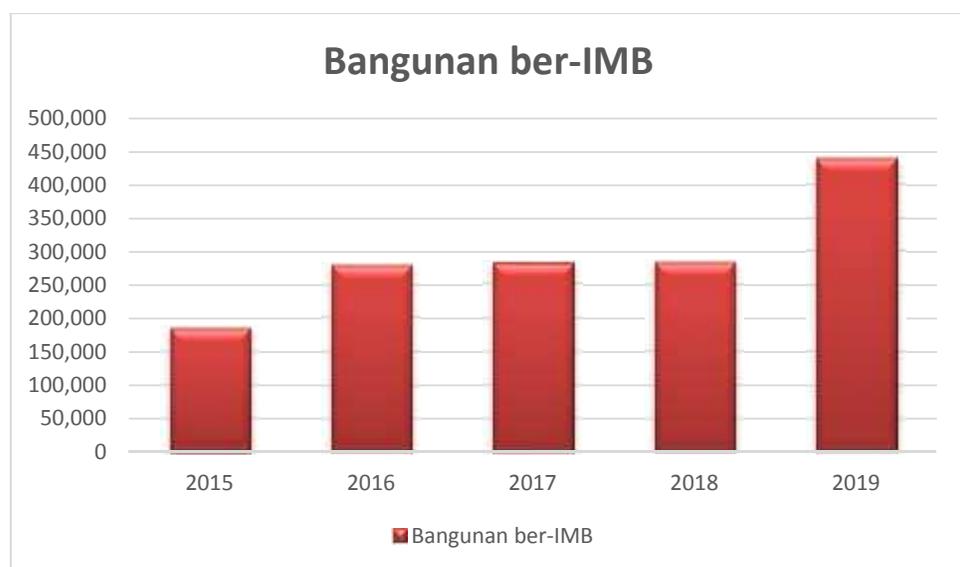
- Masyarakat bersanitasi sehat
- Masyarakat pengguna air bersih
- Pembuatan/Pembangunan taman – taman/penghijjauan pada masing masing lingkungan
- Pembersihan lingkungan secara swadaya/gotong royong oleh masyarakat.

Persentase Bangunan Ber-IMB

Di tahun 2019 bangunan ber IMB sebesar 438.388 lebih banyak apabila dibandingkan dengan bangunan ber IMB di tahun 2018 sebanyak 281.918, dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 156.470 bangunan yang ber IMB. Kenaikan bangunan ber IMB disebabkan :

- a. Kesadaran masyarakat akan perijinan bangunan.
- b. Adanya ketentuan yang mengharuskan bangunan ber-IMB untuk pengajuan ke Bank.
- c. Kemudahan pelayanan perijinan berbasis Informasi Teknologi / IT.

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Bangunan ber-IMB	183.025	277.999	280.409	281.918	438.388



Sumber Data : Dinas P2CKTR Kab. Sidoarjo

Beberapa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan jumlah bangunan ber IMB adalah :

- a. Masih banyak pengajuan IMB yang tidak sesuai kondisi di lapangan
- b. Perkembangan pertumbuhan bangunan tidak sejalan dengan RTRW
- c. Pembangunan yang tidak didukung IMB tanpa penertiban.

Sedangkan apabila diperbandingkan dengan target di tahun 2019 sebanyak 438.388 bangunan, maka tercapai sekitar 100%.

Permasalahan :

- a. Subjek data / pemilik hunian sulit ditemui / tidak mengetahui terkait kepemilikan IMB dimaksud dan atau permasalahan lain yang berhubungan dengan IMB rumah/bangunan yang dihuni.
- b. Data base rumah ber IMB tidak sepenuhnya Up date.
- c. Subyek data masih banyak yang belum tahu terkait pemberlakuan perda No. 4 Tahun 2012 Tentang IMB di wilayah kabupaten Sidoarjo.
- d. Maraknya pembangunan-pembangunan tanpa memiliki IMB.

Solusi:

- a. Berkoordinasi secara terus menerus dengan pemerintahan wilayah guna memantau perkembangan masyarakat yang melakukan pengurusan IMB.
- b. Bekerjasama dengan instansi terkait guna melakukan kegiatan sosialisasi Perda No.4 Tahun 2012 Tentang IMB.
 1. Sosialisasi kepada warga dan ASN yang ada di wilayah (Kelurahan/Desa, Kecamatan).
 2. Melakukan pemberian teguran 1,2,3, penyegelan dan pembongkaran bangunan yang tidak ber-IMB.
 3. Permintaan data rekanan pada asosiasi yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan OPD Penerbit IUJK.
 4. Dilakukan bimbingan teknis Uji Sertifikasi Kompetensi tenaga kerja terampil.

c. SKPD Penyelenggara Urusan

Urusan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman ini dilaksanakan oleh OPD yaitu Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di urusan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kabupaten Sidoarjo berjumlah 35 orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan

Perumahan rakyat dan kawasan permukiman menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran (per program)

Secara rinci anggaran dan realisasi masing masing program sebagaimana terlampir.

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program pembangunan sarana prasarana perumahan dan permukiman	Rp 74,994,715,658.00	Rp 57,538,160,924.00	76.72%

f. Proses Perencanaan

Proses perencanaan urusan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman dilaksanakan melalui metodologi survey. Berdasarkan permasalahan yang ada disusun rencana kerja dan disempurnakan dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur dari Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk menyusun program kerja tahunan.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang adalah sebagaimana terlampir

5. Urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

a. Program

Program pembangunan untuk urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan pada tahun 2019 adalah :

1. Program pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
3. Program Perlindungan Masyarakat
4. Program Pencegahan Dini. Kesiapsiagaan. Tanggap Darurat dan Manajemen Logistik Kebencanaan
5. Program Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
6. Program Peningkatan Kesiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

b. Realisasi Pelaksanaan Program serta Permasalahan dan Solusinya

Hasil seluruh program Urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang telah dilaksanakan dapat terlihat dengan tercapainya :

Indeks Rasa Aman

Indeks Rasa Aman digunakan untuk mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.

Target yang ditetapkan di tahun 2019 dalam RPJMD untuk indeks rasa aman adalah 75,37% , sedangkan capaian tahun 2019 adalah 76,01%, sehingga tercapai 100,8%.

Keamanan adalah keadaan bebas dari cedera fisik dan psikologis atau bisa juga keadaan aman dan tentram. Kenyamanan/rasa nyaman adalah suatu keadaan telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia salah satunya yaitu kebutuhan akan ketentraman.

Mendasari definisi rasa aman diatas, indeks rasa aman dalam hal ini dapat diartikan sebagai petunjuk angka sebagai tolak ukur untuk mengukur dan mengetahui sejauhmana tingkat rasa aman/nyaman/ketentraman yang dirasakan warga masyarakat Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan aktivitas kehidupannya sehari-hari.

Pada tahun 2019 telah dilakukan survey/pengukuran indeks rasa aman di Kabupaten Sidoarjo, dengan responden 150 orang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan memperoleh hasil Nilai Indeks Rasa Aman 76,01 % dengan kategori Rasa Aman Tinggi.

Persentase anggota Satlinmas yang aktif dalam pengendalian lingkungan

Penjelasan mengenai indikator program ini menguraikan 2 (dua) variabel pendukung, antara lain sebagai berikut :

1. Rasio jumlah Satlinmas terhadap Jumlah RT (Rukun Tetangga)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2008 Tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, disebutkan ideal komposisi personil Satlinmas di Kabupaten/Kota adalah jumlah personil Satlinmas berbanding dengan jumlah RT (Rukun Tetangga).

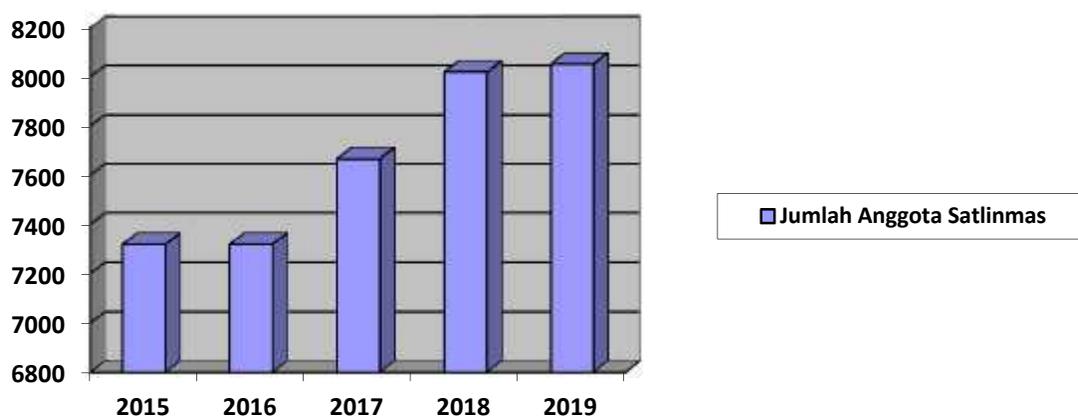
Kondisi riil jumlah RT di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo sebanyak 8.427, sedangkan jumlah personil Satlinmas yang ada sampai dengan tahun 2019 terdata sebanyak 8.051 Personil. Target pemenuhan/penambahan anggota Satlinmas pada tahun 2019 adalah 1% (80 personil). Pencapaian target dilakukan dengan kegiatan Pembinaan Potensi Masyarakat. Secara eksplisit kegiatan dimaksud berupa Sosialisasi terhadap warga masyarakat perihal urgensi keberadaan dan partisipasi satlinmas dalam pengendalian keamanan lingkungan, ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan tanggap bencana. Sasaran utama *locus* sosialisasi ditujukan pada Desa/Kelurahan yang masih minim jumlah personil satlinmasnya.

Dari penetapan target tahun 2019 (1%/80 personil), pemenuhan/penambahan anggota satlinmas telah tercapai pada angka 8.051 personil. Berikut penyajian data perihal pemenuhan anggota satlinmas.

NO	URAIAN DATA	TARGET RENSTRA	REALISASI
		2019	KINERJA 2018
1	Rasio jumlah anggota linmas terhadap jumlah RT (sesuai SPM 1 RT / 1 anggota linmas)	1 : 1 (80 Orang)	1 : 1 (80 Orang)

NO	URAIAN DATA	JUMLAH
1	Jumlah RT Se-Kabupaten Sidoarjo	8.427
2	Jumlah linmas desa yang harus dipenuhi/direkrut selama 3 tahun (2017 – 2019)	1.109
3	Jumlah Linmas yang harus direkrut tahun 2019 (target)	80 (1%)
4	Jumlah Linmas Desa yang telah direkrut tahun 2019 (pencapaian target)	8.051
5	Jumlah total anggota satlinmas se-Kabupaten Sidoarjo tahun 2019	8.051

Berikut Grafik Peningkatan/Penambahan Anggota Satlinmas di Kabupaten Sidoarjo



Sumber Data : Satpol PP Kab. Sidoarjo

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam perekrutan anggota satlinmas desa/kelurahan antara lain :

- Rata-rata personil anggota linmas di desa/kelurahan sudah lanjut usia
- Rendahnya minat masyarakat terhadap linmas sehingga menyulitkan proses perekrutan
- Pemerintah desa/kelurahan masih banyak yang belum memahami fungsi kelinmasan
- Pemerintah desa/kelurahan masih banyak belum mengalokasikan anggaran untuk kegiatan linmas

Upaya/langkah untuk pemenuhan personil Satlinmas pada tahun selanjutnya antara lain :

- Melakukan inventarisasi dan menganalisa jumlah satuan linmas yang dibutuhkan di tingkat RT
- Melakukan Sosialisasi tentang pentingnya kebutuhan Satlinmas di setiap RT kepada Kepala Desa/lurah dan Kepala RW
- Melakukan Sosialisasi peran dan fungsi linmas kepada Camat, Kepala desa/lurah, tokoh masyarakat dan LSM

2. Peran Aktif Satlinmas Dalam Pelaksanaan Fungsi Kelinmasan

Pengkoordinasian dan pengerahan satlinmas desa/kelurahan merupakan tupoksi dari Satpol PP Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan pengerahan anggota satlinmas desa/kelurahan ditujukan pada partisipasi dan fungsi kelinmasan seperti pemeliharaan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, tanggap bencana dan

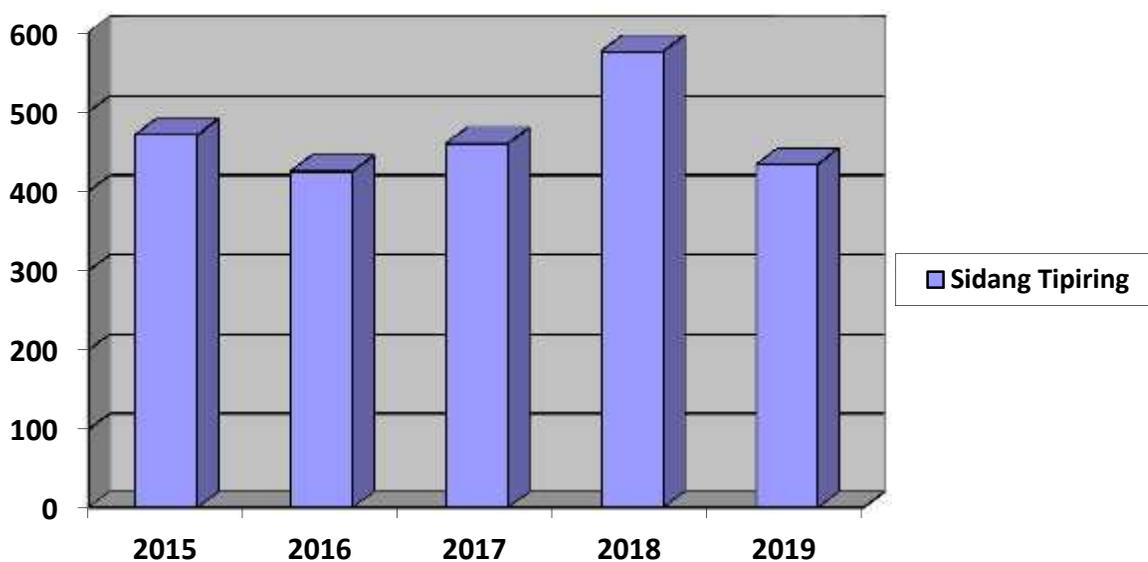
kegiatan sosial kemasyarakatan (sesuai Permendagri No. 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat).

Persentase kasus pelanggaran peraturan daerah yang ditangani

Ruang lingkup penegakan peraturan daerah salah satunya adalah kegiatan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelesaikan setiap terjadinya pelanggaran peraturan daerah dengan langkah penindakan represif yustisial.

Bentuk pelaksanaannya diimplementasikan dengan penyelenggaraan Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) bagi pelaku pelanggaran peraturan daerah.

Jumlah penyelesaian pelanggaran peraturan daerah melalui proses sidang tipiring pada tahun 2019 sebanyak 434 pelanggar. Kondisi ini mengalami penurunan 25 % dari tahun 2018 yang menyidangkan sebanyak 576 pelanggar.



Sumber Data : Satpol PP Kab. Sidoarjo

Dari data grafik diatas dapat diketahui terjadi penurunan jumlah pelanggar yang ditindak secara pro yustisial pada tahun 2019, hal tersebut dikarenakan sosialisasi penegakan perda tahun 2019.

Penegakan peraturan daerah secara pro yustisial pada tahun 2019 dititikberatkan pada lokasi – lokasi yang ditentukan guna mendukung dan sinkron dengan penanganan gangguan tibumtranmas. Prioritas utama penegakan peraturan daerah dan gangguan tibumtranmas adalah pada wilayah 9 (sembilan) jalur utama seperti yang dijelaskan pada point sebelumnya.

Narasi positif yang dapat disampaikan dalam hal ini adalah peningkatan frekuensi penindakan pro yustisia dan peningkatan jumlah pelanggar peraturan daerah berefek

pada peningkatan prosentase wilayah atau lokasi yang bebas pelanggaran peraturan daerah. Dalam hal ini dapat dilihat secara real di lokasi – lokasi seperti Jl. Gajah Mada, Jl. Mojopahit, Jl. Sisingamangaraja, Sepanjang Jalan Raya waru, Jalan Raya Porong, Jalan Raya Gading Fajar, Sepanjang Taman Pinang dan Pondok Jati serta area Gor dan Jl. Raden Patah.

Berikut Tabel Jumlah Penindakan Yustisial terhadap Pelanggar Perda tahun 2019.

REKAP DATA TIPIRING TAHUN 2019

No.	Tanggal Sidang	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggar (Orang)	KET
1.	20 Februari 2019	Perda 10/2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	43	100%
2.	3 Maret 2019	Perda 10/2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	55	100%
3.	10 April 2019	Perda 10/2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	35	100%
4.	18 Juni 2019	Perda 10/2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	63	100%
5.	10 Juli 2019	Perda 10/2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	23	100%
6.	24 Juli 2019	Perda 10/2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	63	100%
7.	11 September 2019	Perda 10/2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	80	100%
8.	18 September 2019	Perda 10/2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	23	100%
9.	9 Oktober 2019	Perda 10/2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	35	100%
10.	13 November 2019	Perda 10/2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	32	100%
		Total	434	

c. SKPD Penyelenggara Urusan

Urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ini dilaksanakan oleh OPD yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berjumlah 108 orang dari Satuan Polisi Pamong Praja; dan 77 orang dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Secara rinci SDM penyelenggara urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

Sedangkan untuk ketersediaan Jabatan Fungsional di Satuan Polisi Pamong Praja terdapat pranata komputer dan arsiparis, sedangkan di BPBD terdapat fungsional pranata komputer.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran (per program)

Secara rinci anggaran dan realisasi masing masing program sebagaimana terlampir.

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Rp 5,609,871,240.00	Rp 5,424,328,791.68	96.69%
2	Program Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Rp 605,072,120.00	Rp 582,865,202.48	96.33%
3	Program Perlindungan Masyarakat	Rp 500,826,225.00	Rp 450,876,225.00	90.03%
4	Program Pencegahan Dini, Kesiapsiagaan, Tanggap Darurat dan Manajemen Logistik Kebencanaan	Rp 1,450,516,470.00	Rp 1,263,096,550.00	87.08%
5	Program Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Rp 715,704,795.00	Rp 492,254,424.00	68.78%
6	Program Peningkatan Kesiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Rp 6,558,818,330.00	Rp 5,417,654,239.00	82.60%

f. Proses Perencanaan

Proses perencanaan urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan para tokoh masyarakat,

pemerintah desa, kecamatan, perguruan tinggi dan LSM. Proses ini diawali dengan rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan untuk melakukan penyusunan awal rencana. Kemudian pelaksanaan musrenbang desa, dan musrenbang kecamatan, sebagai bahan penyusunan Renja SKPD. Selanjutnya musrenbang kabupaten dan perumusan rancangan akhir. Setelah mendapat kesepakatan dari seluruh pemangku kepentingan dilakukan penetapan rencana.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagaimana terlampir

6. Urusan Sosial

a. Program

Program pembangunan untuk urusan sosial yang dilaksanakan pada tahun 2019 adalah :

1. Program Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

b. Realisasi Pelaksanaan Program serta Permasalahan dan Solusi

Seluruh program Urusan Sosial telah dilaksanakan dan hasilnya dapat dilihat dengan pencapaian :

Penanganan PMKS

Tercapainya persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terhadap jumlah penduduk dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kinerja Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun 2017 - 2019 memenuhi target yang ditetapkan (tercapai di atas 100%), yaitu pada tahun 2017 tercapai 101,55% (realisasi 1,90% dari target 1,93%). Pada tahun 2018 tercapai 100,53% dengan realisasi sebesar 1,89% dari target 1,90%. Pada tahun 2019 tercapai 102,14 persen dengan realisasi sebesar 1,83% dari target 1,87%.
2. Persentase jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dari tahun 2017 - 2019 menunjukkan trend penurunan yaitu pada tahun 2017 sebesar 1,90% (0,03%) dari tahun 2016 pada tahun 2018 sebesar 1,89%

(0,04%) dari tahun 2017 dan pada tahun 2019 sebesar 1,83% (0.06%) dari tahun 2018.

Penurunan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tersebut tidak lepas dari keberhasilan kegiatan Penanganan PMKS yang telah dilakukan antara lain :

1. Persentase Fakir Miskin yang telah terpenuhi kebutuhannya
Indikator program ini bisa di lihat dari jumlah keluarga penerima manfaat Bantuan Non Tunai (BPNT) dari anggaran APBD sebanyak 5.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terealisasi 100 %.
2. Persentase Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN)
Indikator program ini bisa dilihat dari jumlah Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dari anggaran APBD dengan target 97.591 orang dan sudah terealisasi 100 %
3. Persentase Tuna Sosial yang terlayani
Target tuna sosial yang dilayani sebanyak 220 orang dan terealisasi 100% dari target
4. Persentase penyandang disabilitas yang terlayani
Target penyandang disabilitas yang terlayani sebanyak 60 orang dari data penyandang disabilitas sebanyak 2.154 orang, dengan demikian kontribusi capaian kinerja untuk indikator program ini adalah 100% dari target
5. Persentase anak dan lansia bermasalah sosial yang terlayani
Target anak dan lansia bermasalah sosial yang terlayani sebanyak 250 anak/lansia, dan sudah terealisasi 100% dari target.
6. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlayani di Liponsos
Target Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlayani dan berada di Liponsos sebanyak 75 orang / bulan (900 orang/tahun) dan sudah terlayani seluruhnya sehingga terealisasi 100%
7. Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin
Target Pelatihan bagi keluarga miskin sebanyak 510 keluarga dan terealisasi 100% dari target

DATA PENANGANAN PMKS TAHUN 2019

NO	KEGIATAN	Capaian Tahun 2018	Target 2019 Kegiatan (Orang)	Capaian 2019 Kegiatan (Orang)
1	Bantuan Permakanan Panti Asuhan	1.663	1.616	1.616
2	Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan PSM	450	200	200
3	Penanganan PMKS di Liponsos	900	900	900
4	PMKS tercover PBI JKN APBD	87.159	97.591	97.591
5	Bantuan Jaminan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	25	58	58
6	BPNT APBD bagi Keluarga Penerima Manfaat	4.548	5.000	5.000
7	Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas	80	60	60
8	Pembinaan ODHA	200	200	200
9	Pelatihan Keterampilan bagi Keluarga Miskin	-	510	510
10	Bantuan Bagi Perintis Kemerdekaan	7	7	7
11	Bantuan Bagi Warakawuri	100	100	100
12	Pembinaan anak dan lansia	450	250	250
	JUMLAH	95.618	106.492	106.492

Sumber : Data PMKS Tahun 2019

Dari data pada tabel penanganan PMKS tahun 2019 diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

Kinerja penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menunjukkan peningkatan yaitu pada tahun 2019 sebanyak 106,492 jiwa dibandingkan dengan tahun 2018 sebanyak 95,618 jiwa.

PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PKMS) YANG DI TANGANI TAHUN 2017 - 2019

NO	TAHUN	PMKS YANG DI TANGANI
	2017	31.667
	2018	95.618
	2019	106.492



Sumber Data : Dinas Sosial Kab. Sidoarjo

c. SKPD Penyelenggara Urusan

Urusan Sosial ini dilaksanakan oleh OPD yaitu Dinas Sosial.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di urusan Sosial berjumlah 34 orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan Sosial menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

Sedangkan untuk jabatan fungsional tersedia pranata komputer.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran (per program)

Secara rinci anggaran dan realisasi masing masing program sebagaimana terlampir.

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah	Rp 5,142,234,065.00	Rp 4,413,116,675.00	85.82%
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp 2,132,624,590.00	Rp 1,819,771,190.00	85.33%
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 312,966,750.00	Rp 300,441,043.00	96.00%

f. Proses Perencanaan

Proses perencanaan urusan sosial dilakukan secara partisipatif diawali dari rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan, musrenbang desa, serta musrenbang kecamatan, sebagai bahan penyusunan Renja SKPD dengan melibatkan para tokoh masyarakat, Perguruan Tinggi, dan LSM.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan sosial di Dinas Sosial sebagaimana terlampir.

C. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

Status Kinerja LPPD

Untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik, salah satunya adalah dengan melakukan Evaluasi atas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) berdasarkan dari LPPD yang disusun.

Hasil EKPPD kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 memperoleh nilai (score) 3,4108 dengan status kinerja Sangat Tinggi (ST) dan bertahan mendapat peringkat ke-1 (**pertama**) tingkat Nasional dan berhasil meraih predikat bintang 4 (empat) kinerja terbaik. Kabupaten Sidoarjo sudah pernah mendapatkan penghargaan Samkarya Nugraha Parasamya Purnakarya Nugraha dari Presiden Republik Indonesia yang diserahkan melalui Menteri Dalam Negeri pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXI tahun 2017 yang diselenggarakan di Alun – Alun Kabupaten Sidoarjo, serta Satya Lancana Karya Bhakti Praja Nugraha oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta pada tahun 2015. Sehubungan dengan telah berhasilnya Kabupaten Sidoarjo mendapatkan penghargaan tersebut, maka Kabupaten Sidoarjo harus tetap dapat mempertahankan prestasi kebanggannya.

Berikut Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana grafik :

Perkembangan Hasil EKPPD Kabupaten Sidoarjo



Sumber Data : Hasil EKPPD Kementerian Dalam Negeri

Upaya yang dilakukan adalah membuat kebijakan satu OPD satu Inovasi, sehingga kinerja OPD menjadi sangat tinggi dan memiliki nilai lebih. Selain juga menjaga tren Pencapaian Kinerja dari setiap Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada LPPD Kabupaten Sidoarjo.

Opini Atas Audit BPK

Untuk menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah salah satunya adalah dengan menilai opini BPK atas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah.

Untuk memperoleh kinerja keuangan yang baik, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan upaya yaitu pemantapan terhadap penatausahaan keuangan dengan pembinaan terhadap pegawai yang bertugas dibidang keuangan, penyempurnaan atas sistem aplikasi keuangan SIKSDA menjadi terintegrasi dengan RDS (*Regional Development Sistem*), serta penerapan kebijakan transaksi non tunai dalam pengeluaran belanja daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan pembayaran non tunai dalam

belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Selain itu pengelolaan aset daerah juga diupayakan perbaikan melalui upaya :

- a. Menyelaraskan persepsi dan pemahaman serta peningkatan pengetahuan tentang pengelolaan barang milik daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui kegiatan bimbingan teknis, workshop serta pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
- b. Peningkatan koordinasi antar instansi terkait (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo), dalam rangka proses pensertifikatan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, serta dalam rangka penelusuran dokumen kelengkapan pengurusan sertifikat tanah;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sewa barang milik daerah;
- d. Penetapan/kode rekening pendapatan dan belanja secara tepat pada jenis pendapatan/belanja, obyek pendapatan/belanja, rincian obyek pendapatan dan belanja sehingga realisasi pendapatan maupun belanja secara substansi tepat.
- e. Optimalisasi tatakelola barang pakai habis berbasis akrual.

Dengan upaya tersebut diharapkan pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat terkelola dengan baik.

Perkembangan Opini BPK untuk laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat dalam tabel berikut :

Opini BPK Atas Laporan Keuangan

No	Tahun	Opini
1	2014	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2	2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3	2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4	2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5	2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
6	2019	(Masih dalam tahap penilaian)

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2013 sampai dengan 2015 laporan keuangan Kabupaten Sidoarjo dengan Opini BPK atas pemeriksaan LKPD Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraph penjelasan. Sedangkan pada tahun 2016 sampai dengan 2018 opini BPK atas pemeriksaan LKPD naik menjadi Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) murni tanpa paragraph penjelasan, dan untuk tahun 2019 masih dalam proses penilaian.

Dari opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah terlaksana secara baik sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu opini WTP. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah berkomitmen akan memperbaiki kinerja keuangan daerah sesuai dengan catatan yang telah dilakukan oleh BPK. Terlebih lagi BPK tidak hanya melakukan audit pada laporan keuangan saja, melainkan juga melakukan audit terhadap kinerja yang dimulai dari dokumen perencanaan, penganggaran, monev, hingga pelaporan.

D. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

1. Target Dan Realisasi Pendapatan.

Target dan realisasi pendapatan daerah tahun 2019 adalah sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
1	PENDAPATAN			
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.708.311.077.856,00	1.689.953.213.262,69	98,93
1.2.	DANA PERIMBANGAN	1.807.667.515.000,00	1.779.140.856.326,00	98,42
1.3.	LAIN -LAIN PENDAPATAN YANG SAH	878.927.886.040,00	975.532.277.036,00	110,99
	JUMLAH PENDAPATAN	4.394.906.478.896,00	4.444.626.346.624,69	101,13

Sumber Data : BPKAD Unaudited BPK

Realisasi seluruh pendapatan daerah pada tahun 2019 sebesar Rp. 4.444.626.346.624,69 atau 101,13% dari target / anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 4.394.906.478.896,00.

Realisasi pendapatan daerah tahun 2019 secara umum tercapai, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2019 sebesar Rp.1.689.953.213.262,69 atau tercapai sebesar 98,93% dari seluruh target PAD sebesar Rp.1.708.311.077.856,00.

Rincian realisasi dan target PAD tahun 2019 adalah sebagai berikut :

PENDAPATAN ASLI DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
1.1.1.	Pajak Daerah	1.009.946.880.000,00	1.032.160.117.012,09	102,20
1.1.2.	Retribusi Daerah	65.940.720.750,00	72.709.215.824,40	110,26
1.1.3.	Hasil BUMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	35.080.939.322,50	37.034.170.234,50	105,57
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	597.342.537.783,50	548.049.710.191,70	91,75
	JUMLAH	1.708.311.077.856,00	1.689.953.213.262,69	98,93

Sumber Data : BPKAD Unaudited BPK

b. Pajak Daerah

Pajak daerah tahun 2019 realisasinya tercapai sebesar Rp.1.032.160.117.012,09 atau 102,20% dari seluruh target penerimaan pajak daerah.

JENIS / OBYEK PAJAK	ANGGARAN	REALISASI	%
	(Rp)	(Rp)	
Pajak Daerah	1.009.946.880.000,00	1.032.160.117.012,09	102,20
Pajak Hotel	16.500.000.000,00	19.160.663.229,22	116,13
Pajak Restoran	84.500.000.000,00	89.374.707.617,70	105,77
Pajak Hiburan	8.000.000.000,00	8.744.464.694,49	109,31
Pajak Reklame	13.500.000.000,00	13.802.744.150,00	102,24
Pajak Penerangan Jalan	329.000.000.000,00	305.381.298.528,68	92,82
Pajak Parkir	23.500.000.000,00	22.088.671.963,00	93,99
Pajak Air Tanah	1.946.880.000,00	2.142.995.182,00	110,07
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	227.000.000.000,00	237.461.681.071,00	104,61
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	306.000.000.000,00	334.002.890.576,00	109,15

Sumber Data : BPKAD Unaudited BPK

c. Retribusi Daerah

Retribusi daerah tahun 2019 terealisasi sebesar Rp.72.709.215.824,40 atau tercapai 110,26% dari seluruh target retribusi daerah yang ditetapkan. Seluruh jenis retribusi realisasinya terinci sebagai berikut :

JENIS / OBYEK RETRIBUSI	ANGGARAN	REALISASI	%
	(Rp)	(Rp)	
Retribusi Daerah	65.940.720.750,00	72.709.215.824,40	110,26
Retribusi Jasa Umum	24.075.667.500,00	26.813.435.336,00	111,37
Retribusi Jasa Usaha	7.792.944.500,00	17.496.374.780,00	224,52
Retribusi Perizinan Tertentu	34.072.108.750,00	28.399.405.708,40	83,35

Sumber Data : BPKAD Unaudited BPK

d. Hasil BUMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Pendapatan hasil BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp.35.080.939.322,50 dan terealisasi sebesar Rp.37.034.170.234,50 atau tercapai sebesar 105,57%.

JENIS / OBYEK	ANGGARAN	REALISASI	%
	(Rp)	(Rp)	
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD			
Perusahaan Daerah Air Minum "Delta Tirta"	12.000.000.000,00	13.953.230.912,00	116,28
PD Aneka Usaha "Delta Grafika"	341.332.790,00	341.332.790,00	100,00
BPR "Delta Artha"	5.856.798.214,00	5.856.798.214,00	100,00
Bank Jatim	16.882.808.318,50	16.882.808.318,50	100,00
JUMLAH	35.080.939.322,50	37.034.170.234,50	105,57

Sumber Data : BPKAD Unaudited BPK

e. Penerimaan Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan lain – lain PAD tahun 2019 sebesar Rp.548.049.710.191,70 atau tercapai 91,75%, dari target yang ditetapkan sebesar Rp.597.342.537.783,50.

JENIS / OBYEK	ANGGARAN	REALISASI	%
	(Rp)	(Rp)	
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Tidak Dipisahkan Secara Tunai atau Angsuran Cicilan	223.625.000,00	455.583.783,00	203,73
Penerimaan Jasa Giro	6.632.843.598,00	7.121.262.200,77	107,36
Pendapatan Bunga Deposito	57.381.643.868,00	61.348.653.592,86	106,91
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	38.029.600,00	55.323.600,00	145,48
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	323.088.414,76	1.449.534.620,31	448,65
Pendapatan Denda Pajak	2.828.637.629,00	6.709.014.276,00	237,18
Pendapatan Denda Retribusi	168.957.106,00	359.919.461,00	213,02
Pendapatan Dari Pengembalian	5.940.700.296,74	7.088.268.505,74	119,32
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	470.000.000,00	366.372.641,00	77,95
Pendapatan Dari Sewa Aset Pemda (Rumah/Gedung/Tanah/Lahan)	22.868.034.500,00	23.145.479.829,00	101,21
Pendapatan Dari Kesepakatan dan Kerjasama	728.000.000,00	1.010.419.317,00	138,79
Pendapatan Dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	499.392.674.290,00	438.373.961.360,16	87,78

Pendapatan Dari Penjualan Hasil Pasar Murah	203.580.000,00	203.580.000,00	100,00
Pendapatan dari Penerimaan Lain-lain	142.723.481,00	362.337.004,86	254,22
JUMLAH	597.342.537.783,50	548.049.710.191,70	91,75

Sumber Data : BPKAD Unaudited BPK

f. Pendapatan Dana Perimbangan

Pendapatan dana perimbangan tahun 2019 terealisasi sebesar Rp.1.779.140.856.326,00 atau 98,42% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.1.807.667.515.000,00. Rincian target dan realisasi pendapatan dana perimbangan adalah sebagai berikut :

JENIS / OBYEK	ANGGARAN	REALISASI	%
	(Rp)	(Rp)	
Dana Perimbangan			
Bagi Hasil Pajak	108.133.662.000,00	106.152.634.261,00	98,17
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	66.563.666.000,00	78.935.493.725,00	118,59
Dana Alokasi Umum	1.265.567.253.000,00	1.265.114.331.000,00	99,96
Dana Alokasi Khusus	39.893.499.000,00	30.495.476.083,00	76,44
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	327.509.435.000,00	298.442.921.257,00	91,12
JUMLAH	1.807.667.515.000,00	1.779.140.856.326,00	98,42

Sumber Data : BPKAD Unaudited BPK

g. Lain – Lain Pendapatan Yang Sah

Realisasi atas Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terinci sebagai berikut :

JENIS / OBYEK	ANGGARAN	REALISASI	%
	(Rp)	(Rp)	
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	878.927.886.040,00	975.532.277.036,00	110,99
Pendapatan Hibah	153.009.000.000,00	148.319.960.000,00	96,94
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur	153.009.000.000,00	148.319.960.000,00	96,94
Pendapatan Hibah BOS Satuan Pendidikan Negeri	153.009.000.000,00	148.319.960.000,00	96,94
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya	353.192.994.540,00	489.288.344.479,00	138,53
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	353.192.994.540,00	487.070.050.849,00	137,90
Bagi hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	110.342.519.737,00	171.903.068.609,00	155,79
Bagi hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	83.902.789.474,00	117.807.528.712,00	140,41
Bagi hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	107.177.654.166,00	140.631.554.571,00	131,21
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	948.026.316,00	1.237.175.236,00	130,50
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	50.822.004.847,00	55.490.723.721,00	109,19
Dana Bagi Hasil Retribusi dari Kota	0,00	2.218.293.630,00	#DIV/0!
Dana Bagi Hasil Retribusi dari Kota Surabaya	0,00	2.218.293.630,00	#DIV/0!
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	359.343.126.000,00	324.541.207.057,00	90,32
Dana Penyesuaian	359.343.126.000,00	324.541.207.057,00	90,32

Dana Insentif Daerah	63.444.058.000,00	31.722.029.000,00	50,00
Dana Desa	295.899.068.000,00	292.819.178.057,00	98,96
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	13.382.765.500,00	13.382.765.500,00	100,00
<i>Bantuan Keuangan Dari Provinsi</i>	13.382.765.500,00	13.382.765.500,00	100,00
Penunjang Biaya Operasional Program TMMD	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
Bantuan Keuangan Pendidikan	9.410.000.000,00	9.410.000.000,00	100,00
Bantuan Keuangan Kesehatan	3.697.765.500,00	3.697.765.500,00	100,00
Bantuan Keuangan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
Bantuan Keuangan Jalin Matra	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00

Sumber Data : BPKAD Unaudited BPK

2. Target Dan Realisasi Belanja

Target belanja daerah untuk tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp.5.423.124.488.516,28, dari target tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp.4.344.722.393.986,67 atau tercapai sebesar 80,11%, dengan rincian sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
2	BELANJA DAERAH			
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.391.171.337.231,27	2.105.446.327.097,40	88,05
2.2.	BELANJA LANGSUNG	3.031.953.151.285,01	2.239.276.066.889,27	73,86
	JUMLAH BELANJA DAERAH	5.423.124.488.516,28	4.344.722.393.986,67	80,11

Sumber Data : BPKAD Unaudited BPK dan cut off per tanggal 12 Maret 2020

Penjelasan lebih lanjut terhadap penyerapan belanja daerah sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp.2.105.446.327.097,40 atau 88,05% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.2.391.171.337.231,27.

Rincian realisasi belanja tidak langsung adalah sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
2.1.	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai	1.490.510.538.315,44	1.309.546.679.104,40	87,86
2.1.2	Belanja Bunga			
2.1.3	Belanja Subsidi			
2.1.4	Belanja Hibah	211.249.617.000,00	175.282.849.800,00	82,97

2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	82.385.083.100,35	68.719.995.000,00	83,41
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	115.582.620.588,30	115.268.598.214,00	99,73
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	447.815.126.494,18	436.554.980.979,00	97,49
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	43.628.351.733,00	73.224.000,00	0,17
	JUMLAH	2.391.171.337.231,27	2.105.446.327.097,40	88,05

Sumber Data : BPKAD Unaudited BPK

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung tahun 2019 terealisasi sebesar Rp.2.624.486.819.956,30 atau 73,86% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.3.031.953.151.285,01.

Rincian realisasi belanja langsung adalah sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
2.2.	BELANJA LANGSUNG			
2.2.1.	Belanja Pegawai	261.870.839.986,80	208.502.539.912,44	78,18
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.464.886.041.614,54	1.230.594.387.495,27	84,01
2.2.3.	Belanja Modal	1.305.196.269.683,67	803.961.924.262,56	61,60
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	1.800.179.139.421,56	2.239.276.066.889,27	73,86

Sumber Data : BPKAD Unaudited BPK

1. Target Dan Realisasi Belanja Menurut Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan kebijakan umum belanja dan dalam rangka mencapai sasaran program dan kegiatan tahun 2019, rincian realisasi Total Belanja Tidak Langsung sebagaimana dalam tabel 3.1, sedangkan realisasi Total Belanja Langsung sebagaimana dalam tabel 3.2 menurut organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2019

No.	OPD	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1	Sekretariat Daerah	24.801.950.364,00	23.230.358.781,00	93,66
2	Sekretariat DPRD	7.141.280.773,00	6.531.574.211,00	91,46
3	Inspektorat	9.858.631.438,00	9.586.834.371,00	97,24
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	848.629.771.865,72	746.586.012.715,00	87,98
5	Dinas Kesehatan	150.116.936.228,40	128.898.766.017,00	85,87
6	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	16.879.340.991,75	15.118.484.297,40	89,57
7	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	7.598.874.893,25	6.562.299.760,00	86,36
8	Satuan Polisi Pamong Praja	12.039.566.809,00	11.254.781.801,00	93,48
9	Dinas Sosial	4.735.610.306,00	4.163.618.374,00	87,92
10	Dinas Tenaga Kerja	5.540.760.925,00	5.076.068.716,00	91,61

11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	5.326.216.657,80	4.188.023.414,00	78,63
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	6.251.034.228,00	5.562.583.217,00	88,99
13	Dinas Pangan dan Pertanian	22.238.722.169,00	17.972.924.062,00	80,82
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	28.226.406.599,00	25.662.328.301,00	90,92
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.746.349.984,00	6.257.179.880,00	92,75
16	Dinas Perhubungan	11.279.172.824,00	10.204.186.091,00	90,47
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.873.788.437,00	6.378.272.064,00	92,79
18	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	4.859.541.554,00	4.367.168.753,00	89,87
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.201.499.804,00	7.290.962.133,00	88,90
20	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	7.529.541.847,00	6.872.009.213,00	91,27
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.696.735.600,00	4.371.520.227,00	93,08
22	Dinas Perikanan	5.189.263.473,00	4.745.086.206,00	91,44
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	20.571.040.801,00	18.997.218.178,00	92,35
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.114.249.324,00	6.557.246.541,00	92,17
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9.056.314.358,00	8.447.078.947,00	93,27
26	Badan Pelayanan Pajak Daerah	47.182.802.580,00	25.001.572.289,00	52,99
27	Badan Kepegawaian Daerah	25.390.990.742,42	24.962.168.230,00	98,31
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.857.809.796,00	4.514.151.180,00	92,93
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.678.517.788,00	8.187.060.627,00	94,34
30	Rumah Sakit Umum Daerah	48.680.850.000,00	47.037.502.870,00	96,62
31	Kecamatan Sidoarjo	15.969.134.350,00	14.053.404.112,00	88,00
32	Kecamatan Candi	3.941.539.070,00	3.636.206.127,00	92,25
33	Kecamatan Buduran	3.542.213.288,00	3.215.058.539,00	90,76
34	Kecamatan Gedangan	3.544.725.547,00	3.220.422.996,00	90,85
35	Kecamatan Sedati	3.409.474.386,10	3.029.529.240,00	88,86
36	Kecamatan Waru	3.397.480.818,00	3.043.786.271,00	89,59
37	Kecamatan Taman	8.527.356.582,00	7.792.381.002,00	91,38
38	Kecamatan Krian	5.074.597.332,00	4.447.825.561,00	87,65
39	Kecamatan Wonoayu	3.772.882.806,00	3.468.975.627,00	91,94
40	Kecamatan Sukodono	3.677.233.683,00	3.351.892.948,00	91,15
41	Kecamatan Balongbendo	3.296.552.432,00	3.111.451.829,00	94,39
42	Kecamatan Tarik	3.480.321.793,00	3.225.237.770,00	92,67
43	Kecamatan Tulangan	4.332.823.201,00	3.963.859.793,00	91,48
44	Kecamatan Prambon	3.606.455.379,00	3.321.306.965,00	92,09
45	Kecamatan Krembung	3.678.520.209,00	3.470.951.684,00	94,36
46	Kecamatan Tanggulangin	3.550.970.968,00	3.283.057.040,00	92,46
47	Kecamatan Jabon	2.612.888.506,00	2.434.318.906,00	93,17
48	Kecamatan Porong	5.213.774.972,00	4.567.326.113,00	87,60
49	KDH (KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH)	2.745.219.833,00	2.570.986.800,00	93,65
50	DPRD	26.842.800.000,00	25.753.658.315,00	95,94
51	PPKD (SKPD BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	900.660.798.915,83	795.899.647.993,00	88,37
	Jumlah	2.391.171.337.231,27	2.105.446.327.097,40	88,05

Sumber Data : BPKAD Unaudited BPK

Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019

No.	OPD	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1	Sekretariat Daerah	52.803.743.099,50	44.443.526.333,94	84,17
2	Sekretariat DPRD	73.612.011.013,52	48.971.150.591,40	66,53
3	Inspektorat	4.378.668.512,00	3.480.658.685,52	79,49
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	427.389.535.280,00	367.724.251.604,40	86,04
5	Dinas Kesehatan	260.712.289.705,99	203.944.907.429,00	78,23
6	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	642.624.248.757,00	356.683.926.697,72	55,50
7	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	417.607.119.065,07	252.499.248.262,00	60,46
8	Satuan Polisi Pamong Praja	15.380.245.545,00	13.966.769.551,36	90,81
9	Dinas Sosial	10.033.022.583,00	8.602.584.255,00	85,74
10	Dinas Tenaga Kerja	6.623.763.285,50	6.213.361.423,40	93,80
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	14.039.684.129,50	11.381.861.240,00	81,07
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	6.026.300.610,00	5.698.498.592,00	94,56
13	Dinas Pangan dan Pertanian	26.863.651.623,00	23.834.029.993,00	88,72
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	161.353.639.724,00	121.393.778.765,90	75,23
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.266.021.758,00	9.640.310.111,00	85,57
16	Dinas Perhubungan	62.603.076.576,36	45.543.812.897,87	72,75
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	27.593.802.619,61	25.719.842.328,00	93,21
18	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	10.190.932.565,00	9.246.238.446,00	90,73
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.488.849.180,00	8.802.481.803,00	83,92
20	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	16.717.910.529,50	15.017.787.422,60	89,83
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11.400.717.830,00	10.425.854.578,00	91,45
22	Dinas Perikanan	20.942.683.069,00	18.495.944.665,48	88,32
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	38.130.790.831,00	34.566.961.398,01	90,65
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	16.841.446.305,00	14.303.970.379,00	84,93
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	13.144.691.281,04	10.720.890.634,00	81,56
26	Badan Pelayanan Pajak Daerah	14.260.661.045,00	12.160.698.473,20	85,27
27	Badan Kepegawaian Daerah	17.622.076.220,50	12.985.414.519,00	73,69
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.852.692.150,00	8.147.637.722,00	82,69
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.548.412.875,00	10.156.577.606,80	80,94
30	Rumah Sakit Umum Daerah	541.271.456.631,42	456.243.389.831,51	84,29
31	Kecamatan Sidoarjo	19.238.024.034,00	17.270.436.920,00	89,77

32	Kecamatan Candi	1914306027	1652175181	86,31
33	Kecamatan Buduran	2358371820	2165435046	91,82
34	Kecamatan Gedangan	2.148.962.862,50	2.042.331.164,00	95,04
35	Kecamatan Sedati	2.531.330.272,00	2.199.191.417,00	86,88
36	Kecamatan Waru	2.195.812.826,00	1.980.842.317,00	90,21
37	Kecamatan Taman	12452312266	11587249208	93,05
38	Kecamatan Krian	7.593.427.104,00	6.876.007.025,00	90,55
39	Kecamatan Wonoayu	2.154.751.084,00	1.898.181.509,00	88,09
40	Kecamatan Sukodono	2.872.629.788,00	2.635.951.724,00	91,76
41	Kecamatan Balongbendo	2.254.872.380,00	2.041.338.538,00	90,53
42	Kecamatan Tarik	2.173.621.284,00	1.879.990.955,72	86,49
43	Kecamatan Tulangan	1.797.818.140,00	1.452.105.006,00	80,77
44	Kecamatan Prambon	2.092.684.082,00	1.769.060.409,00	84,54
45	Kecamatan Krembung	1.928.101.860,00	1.555.089.590,00	80,65
46	Kecamatan Tanggulangin	2.399.701.782,00	2.221.349.112,20	92,57
47	Kecamatan Jabon	2.310.602.770,00	1.949.007.115,14	84,35
48	Kecamatan Porong	7.211.676.504,00	5.083.958.412,10	70,50
	J u m l a h	3.031.953.151.285,01	2.239.276.066.889,27	73,86

Sumber Data : BPKAD Unaudited BPK dan cut off per tanggal 12 Maret 2020

E. INOVASI DAERAH

Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah

Inovasi pelayanan publik dikatakan sebagai inisiatif terobosan dari instansi/lembaga publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Inisiatif terobosan tersebut terletak pada kebaruan (novelty). Prinsip kebaruan tersebut dibedakan dengan inovasi dalam teknologi yang merupakan keunikan yang khas berbeda dengan yang lain. Kebaruan boleh merupakan pengembangan dari inovasi pelayanan publik yang telah ada, karena inovasi pelayanan publik terus diperbaharui dan bahkan ditiru dengan cara melakukan replikasi. Sedangkan inovasi tata kelola pemerintah merupakan jenis inovasi yang mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan di lingkup internal yang diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja organisasi perangkat daerah. Berikut daftar inovasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintah pada pemerintah Kabupaten Sidoarjo:

NO	PELAKSANA	JUMLAH INOVASI	JUDUL INOVASI PELAYANAN PUBLIK
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3	Sipandu: Skrining Pendengaran Balita di Posyandu (UPT ABK)
			SIKeB (Sistem Informasi Kerusakan Bangunan)
			Calisline (Baca Tulis Online) SMPN 4 Sidoarjo
2	Dinas Kesehatan	6	Posbindu Penyakit Tidak Menular
			Desa Bebas Rokok
			Si Jari Emas
			Remiks (Rekam Medik)
			Pelayanan Konseling Orang Dengan HIV/Aids
			Si CANTIK (Sistem Informasi Cegah Kematian Ibu dan Anak)
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	Aplikasi SEMAR (Sistem Manajemen Arsip)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	M-BONK : Cara Cepat dan Akurat Penanganan Jalan Rusak
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	3	SIKOLING (Sistem Informasi Dokumen Lingkungan)
			Pengelolaan Sampah Terpadu di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Kawasan (TPST)
			Ruang Terbuka Hijau (RTH)
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2	Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)
			E-NYANK Pasar (aplikasi retribusi pasar)
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	Sistem Paket Pelayanan
			Salam 30 Menit
			One Day Service Jemput Bola
8	Dinas Perhubungan	2	Uji KIR Drive Thru
			Uji KIR Jemput Bola
9	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	5	Pelayanan Paket Perijinan Online
			SIPPADU berbasis Elektronik
			Smart Card Dan Tanda Tangan/Stempel Elektronik (SITTEK)
10	Sekretariat DPRD	1	Pelayanan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat (e-Parlemen)
11	Dinas PMDP3AKB	1	Pelayanan Tuntas Korban Mentas dari UPT P2TP2A
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2	Sistem Informasi Bantuan Desa (SiBD)
			Musrenbang Online
13	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	Sistem Informasi Keuangan Kabupaten Sidoarjo (SIKSDA)

NO	PELAKSANA	JUMLAH INOVASI	JUDUL INOVASI PELAYANAN PUBLIK
1	2	3	4
14	Badan Pelayanan Pajak Daerah	1	Pelayanan Pajak secara Online (eSPTPD)
15	Badan Kepegawaian Daerah	5	SIPEKAT : Sistem Pengelolaan Kenaikan Pangkat paperless
			Sistem Penilaian Prestasi Kerja PNS (eSKP)
			Unit Training Of Competence (UTC)
			Kenaikan Gaji Berkala Online
			Daftar Hadir Pegawai Online
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	Rama Damkar : Rangkul Masyarakat Dalam Pemadaman Kebakaran
			Sidoarjo Tanggap (SIGAP)
17	Rumah Sakit Umum Daerah	6	SiMaNEis (Sidoarjo Maternal dan Neonatal Emergency SMS GATEWAY)
			Sistem Informasi Kamar Rawat Inap (InKam)
			e-Tamat (Elektronik Akta Kematian)
			SAntri (SMS ANTRIAN)
			Anak Lahir Membawa Akta dan KK (Alamak)
			Remic (Rekam Medis Elektronik)
18	Kecamatan Sukodono	1	BMW (Berkas Mlaku Dewe)
19	Kecamatan Buduran	1	SIPETEK
20	Kecamatan Krian	1	SICANTIK (Sistem Inovasi Cepat, Amanah, Nyaman, Tegas, Interaktif Dan Kerumah)
21	Kecamatan Tulangan	1	Cepet Mari (sistem pengelolaan keuangan desa yang cepat, tepat, mudah, akuntabel, relevan dan inovatif)
22	Puskesmas Kedungsolo	1	SMS Informasi Tuberculose Paru
23	Puskesmas Medaeng	1	Kegiatan Pos Gizi
24	Puskesmas Jabon	1	Selamatkan Jiwa Wanita dan Anak (SEJIWA)
25	Puskesmas Krembung	2	JUMantik kecil berAksi Nyamuk Jadi IarI (JUMANJI)
			Krembung pEduLi Catin, Usia suBur,ibu daN keluarGa (KECUBUNG)
26	Puskesmas Porong	1	Bersama Ingin Cuci Tangan Bersama Peduli Kesehatan (BINTANG BERLIAN)
27	Puskesmas Urangagung	1	Pos Pembinaan Kesehatan Haji Terpadu
28	Puskesmas Candi	1	Perangi Kanker Mulut Rahim (PeKan MuRah)
29	Puskesmas Tulangan	1	ASI Eksklusif
30	Puskesmas Tarik	9	KEMILAU CINTA (Kelas Ibu Hamil Andalan Utama Cegah Kematian Ibu Dan Neonatal di Tarik)
			SMART IS BEAUTY (Sistem Rekam Medis Puskesmas)
			SIAP Tarik (Sistem Informasi Antrian Puskesmas)

NO	PELAKSANA	JUMLAH INOVASI	JUDUL INOVASI PELAYANAN PUBLIK
1	2	3	4
			JEDA LAYAR (Jemput Dampingi Antar Ibu Bersalin)
			SWEGER (Swadaya Air Bersih Layak Konsumsi Bagi Rakyat)
			WARNA CINTA (Wahana Bermain Anak Cerdas di Tarik)
			CINTA HATI (Dacin Balita Sehat di Tarik)
			RUMAH CINTA (Ruang Menyusui Ramah Anak Cerminan Kasih Ibu di Tarik)
			HAI CINTA (Hallo Imunisasi Cerminan Peduli Balita di Tarik)
31	Puskesmas Waru	1	Gebyar geMpita MEngekspos Sisi Hati (GEMMESH)
32	Puskesmas Barengkrajan	1	Lentera Cinta Untuk Tunas Generasiku Melalui Paguyuban Penyelamatan Seribu Hari Pertama Kehidupan (P2SPK)
33	Puskesmas Krian	4	Sehat Selamat
			Penanganan Penderita HIV AIDS
			Klinik Inisiasi ARV
			Komunitas Peduli Kesehatan Mental (KOPISEMEL)
34	Puskesmas Prambon	1	Kampung UBM (Upaya Berhenti Merokok)
35	Puskesmas Sedati	1	Gerakan Semanggi (Selamatkan Yang Anda Sayangi)
36	Puskesmas Taman	6	Senyum Balitaku
			ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Tuntas
			Posyandu Bina Warung Makan (POSNAWAR)
			Gerakan Masyarakat Kader Risti dan MKIA (GEMA KARISMA)
			Menabung dan Menyumbang di Bank Sampah
			Chat Box Keluhan Pelanggan
37	Puskesmas Buduran	1	Kelas Ibu Hamil Plus
38	Puskesmas Balongbendo	1	Gerakan Masyarakat Menyusui Sejak Dini (GEMA SUSI)
39	Puskesmas Sukodono	1	DELIA CERIA
40	Puskesmas Gedangan	1	Sabar Antri Kita dengarkan Tentang Informasi (SAKTI)
41	Puskesmas Wonoayu	1	DASI
42	Puskesmas Sidoarjo	1	Gerakan Jajan Enak Lan Sehat (GAK JELAS)
43	Puskesmas Ganting	1	Gerakan Polisi Sungai (GPS of STBM)
44	Puskesmas Sekardangan	1	Klas Ibu Menyusui Mom Loves Me (MLM)
45	Puskesmas Trosobo	1	PERMATA CINTA (PERiksa MATa Anda dan Cek Kondisi Kesehatan Anda)
	Jumlah Inovasi	89	

Sumber Data : Bagian Organisasi Setda